LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN

2024

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT
Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur

ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu institusi karena pada LKjIP dilaporkan capaian indikator kinerja tahun 2024 yang mencakup aspek pendukung yang memberikan konstribusi bagi terwujudnya good governance dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, diharapkan sebagai upaya dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dalam penyusunan LKjIP tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang positif dan kritik yang konstruktif guna mengembangkan kinerja peneliti sehingga LKjIP tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan ide / gagasan dalam menyusun LKjIP ini.

KEPALA

DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721222 199403 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan atau pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 5 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

1) Jumlah Trayek Yang Diakses
2) Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
3) V/C Rasio di jalan Provinsi
4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
5) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata – rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2024 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.18.491.134.178 pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp 17,620,959,094 (95,29%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan dengan anggaran sebesar Rp.10.189.358.513, terealisasi sebesar Rp.9.496.171.322 (93,2%).
- Belanja Penunjang Urusan dengan anggaran sebesar Rp.4.311.478.125, terealisasi sebesar Rp.4.200.552.516 (97,43%).
- Belanja urusan sebesar Rp.3.990.297.540, terealisasi sebesar Rp.3.924.235.256 (98,34%).

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 5 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. **Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]**
   Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.873.000, realisasi sebesar Rp. 27.714.557 (86,95%). Sisa anggaran Rp. 4.158.443 merupakan sisa belanja BBM, makan minum aktivitas lapangan, dan lembur
2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
   Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 284.098.500, realisasi sebesar Rp. 243.731.217 (85,79%). Sisa anggaran Rp. 40.367.283 merupakan sisa belanja Tagihan Listrik
3. **Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]**
   Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 82.693.871, realisasi sebesar Rp. 66.324.174 (80,2%). Sisa anggaran Rp. 16.369.697 merupakan sisa belanja BBM, makan minum aktivitas lapangan, lembur, dan belanja internet
4. **Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]**
   Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.320.300, realisasi sebesar Rp. 15.541.699 (89,73%). Sisa anggaran Rp. 1.778.601 merupakan sisa belanja makan minum rapat dan sisa belanja perjalanan dinas dan BBM
5. **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]**
   Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.439.900, realisasi sebesar Rp. 22.728.300 (85,96%). Sisa anggaran Rp. 3.711.600 merupakan sisa belanja makan minum rapat dan BBM

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun masih perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan Kinerja Dinas yaitu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
IKHTISAR EKSEKUTIF II
DAFTAR ISI IV
DAFTAR TABEL V
DAFTAR GAMBAR VII
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Organisasi 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi 1
B. Tugas pokok dan fungsi 2
C. Struktur Organisasi 5
D. Sumber daya Manusia 7
1.2 Aspek Strategis Organisasi 9
1.3 Permasalahan Utama (Isu Strategis) 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah 12
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 15
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja 16
3.3 Capain Kinerja Organisasi 17
3.3.1Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Konektivitas) 17
3.3.2Indikator Kinerja Tujuan (Rasio angka Kecelakaan lalu lintas) 54
3.3.3Indikator Kinerja Tujuan (Nilai Akuntabilitas Kinerja) 67
3.3.4Indikator Kinerja Tujuan (Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi) 72
3.4 Realisasi Anggaran 86
BAB IV PENUTUP 95
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarakan Golongan 7
Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Berdasarakan Esselon 7
Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 7
Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 7
Tabel I. 5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 9
Tabel I. 6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Perhubungan 10
Tabel I. 7 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 10
Tabel II. 1 Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....13
Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 14
Tabel III. 1 Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....16
Tabel III. 2 Target dan realisasi Rasio Konektivitas Tahun 2024 17
Tabel III. 3 Jumlah trayek yang dibutuhkan dan trayek yang dilayani 18
Tabel III. 4 Lintasan angkutan penyeberangan di Sumatera Barat 37
Tabel III. 5 Perbandingan rasio konektivitas dengan Kementerian Perhubungan..... 38
Tabel III. 6 Target dan realisasi sasaran strategis 1 39
Tabel III. 7 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024; 40
Tabel III. 8 Realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di provinsi sumatera barat.....41
Tabel III. 9 Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2023 42
Tabel III. 10 Lintasan kapal penyeberangan Sumatera Barat 43
Tabel III. 11 Jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2024 44
Tabel III. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya 44
Tabel III. 13 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses..... 45
Tabel III. 14 Data Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum 2024..... 47
Tabel III. 15 Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 47
Tabel III. 16 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum..... 48
Tabel III. 17 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi 50
Tabel III. 18 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi..... 53
Tabel III. 19 Target dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas 55
Tabel III. 20 Target dan realisasi sasaran strategis 2 57
Tabel III. 21 Penetapan Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Perhitungan Terkait Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2024 58
Tabel III. 22 Realisasi kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi di provinsi sumatera barat tahun 2024..... 58
Tabel III. 23 Perbandingan V/C Rasio tahun 2021, 2022, dan 2023 61
Tabel III. 24 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi 63

Tabel III. 25 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi 64
Tabel III. 26 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi 66
Tabel III. 27 Target dan realisasi sasaran strategis 3 67
Tabel III. 28 Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 - 2023 68
Tabel III. 29 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 69
Tabel III. 30 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi 70
Tabel III. 31 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ... 71
Tabel III. 32 Target dan realisasi sasaran strategis 3 72
Tabel III. 33 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran 73
Tabel III. 34 Nama responden dalam pengukuran indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan orhanisasi 73
Tabel III. 35 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 1 74
Tabel III. 36 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 2 75
Tabel III. 37 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 3 76
Tabel III. 38 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 4 77
Tabel III. 39 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 5 78
Tabel III. 40 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 6 79
Tabel III. 41 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 7 80
Tabel III. 42 Hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 80
Tabel III. 43 Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tahun sebelumnya 81
Tabel III. 44 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 82
Tabel III. 45 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi 84
Tabel III. 46 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi 85
Tabel III. 47 Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 86
Tabel III. 48 Realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan Program 86
Tabel III. 49 Realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2024: 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 6
Gambar III. 1 kriteria penilaian realisasi kinerja.....15

Gambar III. 2 Grafik Perbandingan realisasi dan % capaian Rasio Konektivitas.....37
Gambar III. 3 Perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum.48
Gambar III. 4 Rekapitulasi Jumlah kematian per tahun dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas 55
Gambar III. 5 Perbandingan capaian kinerja VC Rasio 2021 - 2024 62
Gambar III. 6 Perbandingan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja 68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan transportasi sebagai urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk mengimplementasikan ketentuan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan pedoman mengenai struktur dan klasifikasi perangkat daerah, dengan menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebutuhan daerah. Hal ini memastikan bahwa urusan transportasi yang menjadi kewenangan provinsi dikelola dengan baik.

Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, penyesuaian struktur perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021, yang merupakan perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dalam peraturan daerah ini, perangkat daerah diklasifikasikan ke dalam tiga tipe (A, B, C). Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai perangkat daerah tipe B, yang bertanggung jawab atas urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

Pengaturan lebih rinci mengenai struktur dan fungsi Dinas Perhubungan tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan. Peraturan ini menetapkan pembentukan dua UPTD Kelas A, yaitu:

a) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I
b) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

Kedua UPTD ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya pengaturan ini, pengelolaan transportasi di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan efisien dan mendukung mobilitas serta pembangunan wilayah secara optimal.

B. Tugas pokok dan fungsi

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur ruang lingkup yang meliputi kedudukan, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Peraturan ini menetapkan bahwa Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas utama Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

a) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
b) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
c) Menyelenggarakan administrasi Dinas.
d) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
e) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara optimal, setiap bidang dan sekretariat memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan sekretariat yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Sumatera Barat:

1. Sekretariat

   Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
   b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
   c) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
e) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
f) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis lalu lintas dan pembinaan keselamatan;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan;
c) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas, dan pembinaan keselamatan;
d) pelaksanaan pembinaan di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan ke Kabupaten/Kota;
e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan; dan
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan

Bidang Angkutan Jalan, Perkerataapian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan Jalan, Perkerataapian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) penyiapan bahan penyiapan kebijakan teknis di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
b) pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
c) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
d) pelaksanaan pembinaan di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan ke kabupaten/kota;
e) pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan;
f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas di bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan; dan
g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
c) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
d) penyiapan rencana pembangunan sarana dan prasarana bidang pelayaran; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Penyelenggaraan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
c) pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan terminal;
d) pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan terminal;
e) pelaksanaan kegiatan pengawasan, penertiban dan penindakan pelanggaran angkutan umum dalam terminal;
f) pelaksanaan pemungutan retribusi pada terminal;
g) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan; dan
h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas di setiap bidang dan sekretariat, Dinas Perhubungan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung kelancaran sistem transportasi di Provinsi Sumatera Barat.

C. Struktur Organisasi

Dasar:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 20 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan hal diatas, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024:

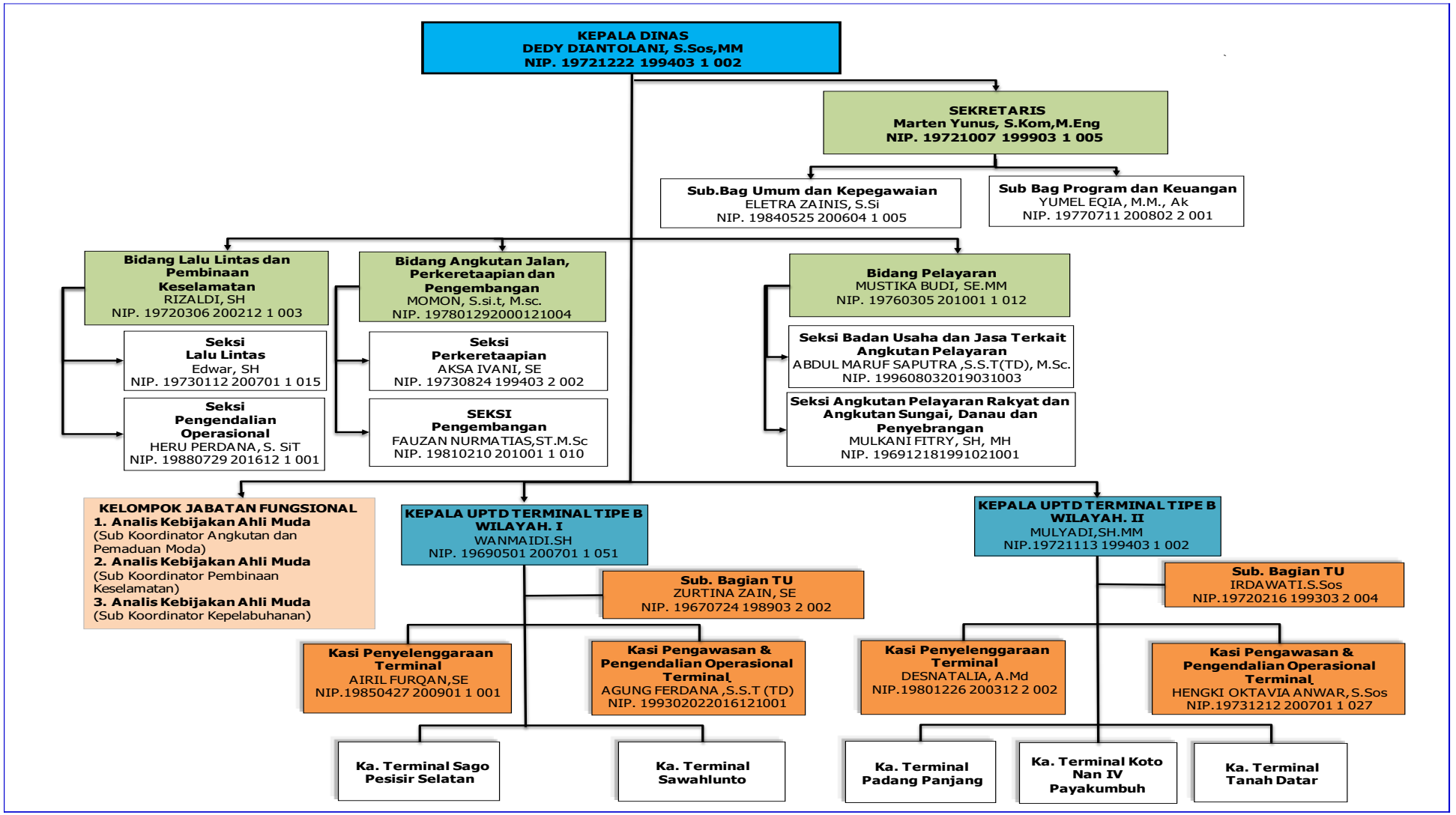

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

D. Sumber daya Manusia

Jumlah Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Kondisi Desember 2024 adalah sebanyak 75 Orang, berikut rinciannya:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarakan Golongan

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah
1	Gol I	-
2	Gol II	22
3	Gol III	45
4	Gol IV	8
	Total	**75**

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Berdasarakan Esselon

No	Berdasarkan Esselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	14
4	Staf	56
	Total	**75**

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1	S.2	7
2	S.1/D.4	27
3	D.3	20
4	D.2/D.1/SLTA	21
5	SLTP/SD	-
	TOTAL	**75**

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	56
2	PEREMPUAN	19
	TOTAL	**75**

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas tenaga teknis, Dinas Perhubungan telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD sejak tahun 2014. Kesepakatan ini mencakup pemenuhan kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat melalui dokumen MoU nomor 384/VI/HK201/STTD-2014 dan nomor 120-4/GSD/2014.

Pada tahun 2019, MoU tersebut diperpanjang untuk lima tahun ke depan dengan nomor HK.201/6/14/STTD-2019 dan nomor 120-030-PKS/GSB-2019. Sebagai hasil dari kerja sama ini, jumlah pegawai teknis yang merupakan lulusan STTD telah meningkat dari tahun 2014 hingga 2024. Mereka kini berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan tugas teknis di Dinas Perhubungan.

Namun, kebutuhan tenaga pelaksana administratif masih menghadapi tantangan dari segi kualitas dan kuantitas. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Kurangnya pengelolaan analisis jabatan dan beban kerja, sehingga distribusi pegawai belum ideal.
b) Kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas sebagian besar pegawai masih perlu ditingkatkan.
c) Perencanaan SDM yang belum komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kinerja.
d) Minimnya pelatihan dan pendidikan khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana.

Selain SDM, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Dinas Perhubungan. Fasilitas utama mencakup satu gedung utama berlantai dua yang terdiri dari ruangan Kepala Dinas, Sekretaris, tujuh ruang untuk masing-masing bidang atau subbagian, tiga aula, serta toilet di setiap lantainya. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan juga telah menambah fasilitas Ruang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk mendukung layanan informasi publik.

Fasilitas lainnya meliputi satu bangunan mushola, kantin, gudang, gedung tambahan untuk seksi Pengendalian Operasional bidang Lalu Lintas, serta pos satpam di pintu masuk dan keluar. Semua gedung dalam kondisi layak, meskipun membutuhkan pemeliharaan rutin setiap tahun.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". Upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut adalah dengan menetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mendukung pencapaian Misi 6.

Berikut ini misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah serta indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan

Tabel I. 5 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

IKU Kepala Daerah		
Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Merata IK: Indeks Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	Rasio Konektivitas (Rasio)

Sumber data: RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas, misi 6 ini diuraikan menjadi beberapa sasaran, dan Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi.

Pada bidang transportasi yang dimaksud dengan Infrastruktur adalah fasilitas transportasi seperti simpul transportasi (Terminal, Bandara, Pelabuhan, Stasiun) serta fasilitas pendukungnya seperti halte, shelter, dermaga penyeberangan, dll. Sedangkan untuk infrastruktur yang terintegrasi dibidang transportasi dapat diartikan untuk semua simpul – simpul transportasi tersebut dapat saling terhubung.

Dari sasaran pada misi 6 tersebut, terdapat Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas, dimana secara umum dapat diartikan sebagai wilayah yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut, serta dapat diartikan juga sudah terhubungnya wilayah, kawasan serta simpul transportasi yang ada di Sumatera Barat.

Sehingga peran rasio konektivitas dengan infrastruktur terintegrasi yaitu apabila rasio konektivitas semakin bagus, maka dapat diartikan infrastruktur (Simpul transportasi, berupa: terminal, bandara, pelabuhan, stasiun) sudah terintegrasi dengan baik

Kemudian untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan juga ditetapkan indikator kinerja daerah (IKD). Berikut ini penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sumatera barat yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan:

Tabel I. 6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja Kunci	Keterangan
Rasio konektivitas Provinsi	IKU dan IKD
Kinerja lalu lintas provinsi	IKD
Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD

Sumber data: RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 IKD urusan perhubungan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, dimana ke 3 (tiga) indikator ini akan dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

Tabel I. 7 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	Trayek
				Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	Orang
2	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	Rasio
3	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	%

Sumber data: Renstra 2021 – 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung capaian kinerja Kepala Daerah.

1.3 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis merupakan isu - isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat atau kegiatan-kegiatan sekarang yang dapat diantisipasi yang mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap pencapaian kinerja Sektor Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai permasalahan di bidang perhubungan yang dihadapi ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program Kepala Daerah, dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan capaian sasaran yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026, yaitu:

a) Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utama tipe B dari aspek kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
b) Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas, konektivitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
c) Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang kereta api
d) Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan
e) Belum optimalnya pelabuhan Penyeberangan yang ada untuk melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (konektivitas antar pulau)
f) Penurunan Level of Sevice (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mendukung dan mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam misi ke-6, maka berdasarkan Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi, yaitu:

"Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu"

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana prasarana transportasi yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan cara meningkatkan pelayanan, fungsi forum koordinasi lalu lintas angkutan & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam tiga tujuan dan empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra.

Tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2021 - 2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 1 Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	Trayek	6	6	6	6	6	6
				Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	Orang	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
2	Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	Rasio	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45
3	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB 70,00	BB 71,00	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	%	78%	79%	80%	81%	82%	83%

Sumber data : Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas terlihat keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan IKU dan IKD yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini tercermin dalam Indikator Kinerja Tujuan maupun indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan.

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2024 dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Perhubungan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan disesuaikan dengan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

Berikut ini perjanjian kinerja perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,42
3.	Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	81%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	4.349.590.125	APBD
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	3.159.657.371	APBD
3	Program pengelolaan pelayaran	724.728.969	APBD
4	Program pengelolaan perkeretaapian	67.799.200	APBD
Jumlah		**8.301.775.665**	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Realisasi\ /\ Target\ x\ 100\%$$

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2\ x\ Target) - Realisasi)/Target\ x\ 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

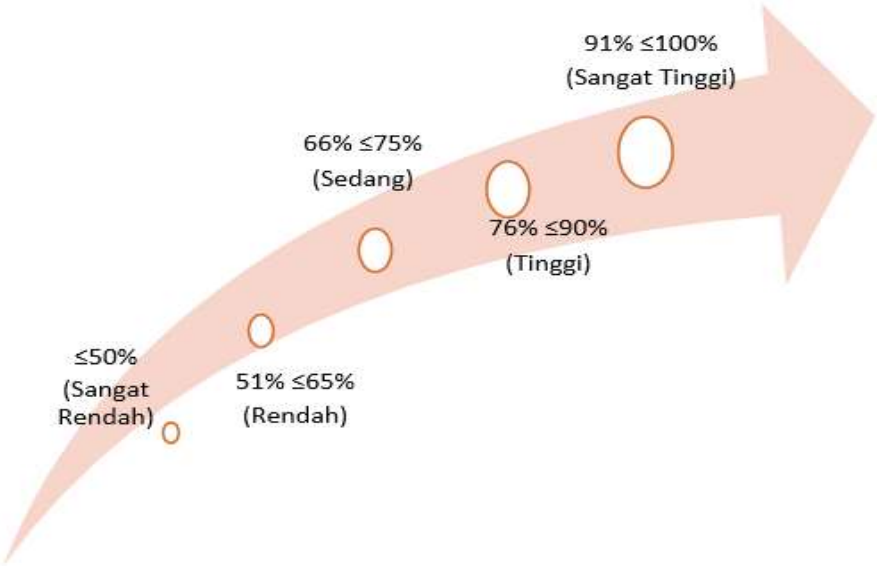

Gambar III. 1 kriteria penilaian realisasi kinerja

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Dari 4 sasaran strategis ditetapkan 5 indikator kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Trayek Yang Diakses
2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
3. V/C Rasio di jalan Provinsi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
5. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 1 Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 %
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang	20.248.342 Orang	101,24%
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,42	0,41	102.38 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,00 BB	73,20 B	101,67 %
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	81%	86,90 %	107,28%
Rata – rata Capaian Indikator Kinerja					105 51%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah bagus. Dari 5 (lima) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

3.3 Capain Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis

3.3.1 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio Konektivitas)

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas.

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah terlayani oleh moda transportasi (darat dan laut) serta tingkat keterhubungan antar wilayah, kawasan, dan simpul transportasi.

Untuk tahun 2024 penetapan target mengacu pada penghitungan rasio konektivitas Provinsi pada tahun awal RPJMD 2021 – 2026, berdasarkan RPJMD 2021 – 2026 target rasio konektivitas yaitu 0,684, artinya target Sumatera Barat sebayak 68,4 % wilayah sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 0,670, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu 0,684.

Berikut ini hasil perhitungan rasio konektivitas

Tabel III. 2 Target dan realisasi Rasio Konektivitas Tahun 2024

Tujuan : Meningkatnya konektivitas antar wilayah			
Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
Rasio Konektivitas	0,684	0,682	99,71 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Rasio Konektivitas Jalan Provinsi yang tercapai 99,70 % diukur berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan formula sebagai berikut:

Rasio konektvitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1. IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut).
2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

Note:

- Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30 (sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)

- Untuk bobot trayek atau lintas berdasarkan jumlah perjalanan angkutan (frekuensi), yaitu:
  a) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1
  b) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8
  c) Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5

Berikut ini hasil penghitungan rasio konektivitas pada tahun 2024:

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

$$= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}}$$

$$= \frac{\mathbf{139\ x\ 1}}{\mathbf{183}}$$

$$= 0{,}760$$

Penjelasan:
Untuk angka 139 merupakan lintasan trayek yang saat ini dilalui oleh operator angkutan dari jumlah kebutuhan trayek yaitu 183 trayek, berikut ini data lintasan trayek serta nama perusahaan yang melayaninya pada kondisi akhir tahun 2024:

Tabel III. 3 Jumlah trayek yang dibutuhkan dan trayek yang dilayani

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
1	1	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi	PT. Oke Oke Bos
			PT. Testing123
			PT. Yudha Transport Ekspres
			PT. Ricky Rajo Transport
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Sarah Nursyifa Transport
2	2	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh	PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Sarah Nursyifa Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
3	3	Padang - Lubuk Selasih - Solok	PT. Trans Mitra Ibu
			PT. Fifafel Perdana Trans
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Danau Raya Ibu
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Dirgantara Kencana Mulia
4	4	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Sawahlunto	PT. Fifafel Perdana Trans
			PT. Indra Trans Gemilang
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Dirgantara Kencana Mulia
5		Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Sawahlunto	-
6		Padang - Lubuk Alung	-
7	5	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Sei. Limau	PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
8	6	Padang - Lubuk Alung - Sicincin - Sei. Sarik - Pd. Sago - Balepoh	PT. Melsy Anugrah Transport
9	7	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Sei. Limau - Sei. Geringging	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
10	8	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Lubuk Basung	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Dagang Pesisir Jaya
			PT. Lubuk Basung Express
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Bintang Lubuk Basung
			PT. Harmonis Trans Mandiri
11	9	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman - Lubuk Basung - Maninjau	PT. Dagang Pesisir Jaya
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Harmoni Lubuk Basung
			PT. Bintang Lubuk Basung

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
12	10	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Matur - Koto Alam	PT. Bintang Rosa Transport
13	11	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping	PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Famili Ceria Group
14	12	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping - Panti	PT. Famili Ceria Group
15	13	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Lubuk Sikaping - Panti - Rao	PT. Famili Ceria Group
			PT. Khatulistiwa Bonjo Pusako
16	14	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Talu - Panti	PT. Famili Ceria Group
17	15	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban	PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Sarah Nursyifa Transport
18	16	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki	PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Talago Jaya Prima
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Sarah Nursyifa Transport
19	17	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Talago Jaya Prima
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Sarah Nursyifa Transport
20	18	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Lubuk Bangku - Pkl.Kotobaru	PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Yudha Transport Ekspres
			PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Sarah Nursyifa Transport
21	19	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl.	PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Ricky Rajo Transport
			PT. Sinamar Transport Mandiri

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Kotobaru - Gn. Malintang - Muara Peti	PT. Sarah Nursyifa Transport
22	20	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Mahat	PT. Tintin Transport Sukra
			PT. Talago Jaya Prima
23	21	Padang - Padang Panjang - Batusangkar	PT. Yanti Citra Pelangi
			PT. Permata Ananda Transport
			PT. Batusangkar Indah Transport
24	22	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Sungayang	PT. Permata Ananda Transport
			PT. Batusangkar Indah Transport
25	23	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Tabek Patah	PT. Permata Ananda Transport
			PT. Batusangkar Indah Transport
26	24	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Pd. Ganting	PT. Batusangkar Indah Transport
27	25	Padang - Padang Panjang - Batusangkar - Balai Tangah	PT. Mata Air Lintau
			PT. Multi Karya Setangkai
28	26	Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban - Balai Tangah	PT. Sarah Nursyifa Transport
			PT. Harapan Mama Transport
29		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Ampalu - Sitangkai - Balai Tangah	-
30	27	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Malalo	PT. Tanjung Jaya Mutiara
31	28	Padang - Padang Panjang - Malalo	PT. Carano Minang Transpor
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
32	29		PT. Telaga Indah Group

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang	PT. Tri Saudara Ekspres
33		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Balik - Sulit Air	-
34	30	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Sijunjung	PT. Indra Trans Gemilang
			PT. Jasa Malindo Ibu
35	31	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao	PT. Tampalo Prima Group
36	32	Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
37		Padang - Pasar Baru - Koto Ranah	-
38		Padang - Pasar Baru - Painan - Batang Kapas	-
39	33	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
40		Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Balai Selasa	-
41		Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Air Haji	-
42	34	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
43	35	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura - Tapan	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
44	36	Padang - Pasar Baru - Painan - Kambang - Indrapura - Tapan - Silaut	PT. Famili Ceria Group
45	37	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman	PT. Alisma Alizar Asmanelly

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
46		Padang - Lubuk Alung - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	-
47		Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat	-
48	38	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Sasak	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Bintang Pasaman Express
			PT. Armada Gading Sejati
49	39	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Talu	PT. Alisma Alizar Asmanelly
			PT. Alisma Jaya Mandiri
			PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Bintang Pasaman Express
50	40	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading	PT. Alisma Alizar Asmanelly
51	41	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Bintang Pasaman Express
			PT. Armada Gading Sejati
52	42	Padang - Pariaman - Manggopoh - Sp. Empat - Desa Baru	PT. Famili Ceria Group
			PT. Mandala Putra Mandiri
			PT. Armada Gading Sejati
53	43	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh	PT. Telaga Indah Group
			PT. Usaha Murni Pratama
54	44	Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh - Pd. Aro	PT. Telaga Indah Group
			PT. Usaha Murni Pratama
55		Padang - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Muara Labuh - Liki - Leter W	-
56		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Sp. Sikabau - Sp. Kotobaru - Ampalu	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
57	45	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao - Kotobaru - Sei. Rumbai	PT. Indra Trans Gemilang
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Tampalo Prima Group
58	46	Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao - Kotobaru - Abaisiat - Sitiung Iv	PT. Tampalo Prima Group
59		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Tj. Gadang - Tanah Bedantung - Kiliranjao - Sei. Rumbai - .Kt. Besar	-
60		Padang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Sitiung - Timpeh	-
61	47	Bukittinggi - Piladang - Payakumbuh	PT. Pelita Arruya Mandiri Utama
			PT. Yudha Transport Ekspres
62	48	Bukittinggi - Padang Panjang	PT. Pelita Indah Travel
			PT. Pelita Arruya Mandiri Utama
			PT. Karya Abadi Jaya Utama
			Kop. Angkutan Sakato
			PT. Ransam Indah Transport
			PT. Silvia Indah Mandiri
63	49	Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok	PT. Carano Minang Transpor
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Tri Saudara Ekspres
			PT. Binuang Express Group
64	50	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Ombilin - Solok	PT. Silvia Indah Mandiri
65	51	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Pd. Ganting - Sawahlunto	PT. Emkazet Sejahtera Lestari
			PT. Permata Bunda Transport
			PT. Grand Son Indah
66	52		PT. Silvia Indah Mandiri

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto	PT. Tanjung Jaya Mutiara
67	53	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman - Sei. Limau	PT. Melsy Anugrah Transport
68	54	Bukittinggi - Sp. Koto Tuo - Malalak	PT. Pelita Indah Travel
69	55	Bukittinggi - Matur - Lawang	PT. Pelita Indah Travel
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Teratai Satria Jaya
70	56	Bukittinggi - Matur - Palembayan	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Teratai Satria Jaya
			PT. Setia Utama Mandiri
71	57	Bukittinggi - Matur - Palembayan - Koto Alam	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Setia Utama Mandiri
72	58	Bukittinggi - Matur - Maninjau	PT. Setia Utama Mandiri
			PT. Harmonis Ceria Wisata
73	59	Bukittinggi - Matur - Maninjau - Lubuk Basung	PT. Setia Budi Wisata
			PT. Setia Satria Jaya
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Harmoni Lubuk Basung
			PT. Harmonis Trans Mandiri
74	60	Bukittinggi - Baso - Padang Tarok	PT. Pelita Indah Travel
			PT. Pelita Arruya Mandiri Utama
75	61	Bukittinggi - Simp.Tigo Baleh - Kubang Putiah - Sei. Pua - Kapalo Koto - Badorai	PT. Penampung Jaya Lemersing
76	62	Bukittinggi - Tj. Alam - Sp. Biaro - Lasi - Pasanehan	PT. Fajar Kalimatang Jaya
			PT. Merapi Ceria Mandiri
77	63	Bukittinggi - Pincuran - Sp. Tabik - Durian - Sei. Dareh (Tilatang Kamang)	PT. Putra Salam Prima
			PT. Kamang Jaya Agam

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
78	64	Bukittinggi - Tj. Alam - Sp. Sikabau - Bukik Kulirik - Sp. Pintu Koto - Bt. Baragung	PT. Putra Salam Prima
			PT. Kamang Jaya Agam
79	65	Bukittinggi - Pakan Kamih - Koto Panjang - Pakan Sinayan - Tarusan	PT. Putra Salam Prima
			PT. Kamang Jaya Agam
80		Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping	-
81	66	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti	PT. Famili Ceria Group
82	67	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Rao	PT. Famili Ceria Group
			PT. Khatulistiwa Bonjo Pusako
83	68	Bukittinggi - Baso - Sp. Batu Hampar - Suayan	PT. Pelita Indah Travel
84	69	Bukittinggi - Payakumbuh - Halaban	PT. Putra Agung Sepakat
85	70	Bukittinggi - Payakumbuh - Suliki	PT. Putra Agung Sepakat
86	71	Bukittinggi - Payakumbuh - Koto Tinggi	PT. Putra Agung Sepakat
87	72	Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Koto Baru	PT. Bintang Terang Binter Galuang
88	73	Bukittinggi - Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Ma. Peti	PT. Kapur Indah Abadi
89	74	Bukittinggi - Baso - Batusangkar	PT. Bintang Utara Transport
			PT. Grand Son Indah
			PT. Harapan Mama Transport
			PT. Minang Jaya Transport
			PT. Ras Jaya Transport
			PT. Haji Maswardi Sekeluarga

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
90	75	Bukittinggi - Padang Panjang - Batusangkar	PT. Silvia Indah Mandiri
91	76	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Balai Tangah	PT. Mata Air Lintau
92	77	Bukittinggi - Payakumbuh - Balai Tangah	PT. Mata Air Lintau
			PT. Multi Karya Setangkai
93	78	Bukittinggi - Padang Panjang - Sumpur - Malalo	PT. Carano Minang Transpor
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
94	79	Bukittinggi - Pd. Luar - Pasar Amur - Koto Baru - Pandai Sikek - Koto Laweh	PT. Pelita Indah Travel
95	80	Bukittinggi - Baso - Batusangkar - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung	PT. Emkazet Sejahtera Lestari
			PT. Permata Bunda Transport
			PT. Grand Son Indah
			PT. Muaro Jaya Transport
96	81	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung	PT. Tanjung Jaya Mutiara
97	82	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao	PT. Silvia Indah Mandiri
			PT. Tampalo Prima Group
98		Bukittinggi - Payakumbuh - Balai Tangah - Sitangkai - Kumanis - Sumpur Kudus	-
99	83	Bukittinggi - Padang Panjang - Batusangkar - Sitangkai - Kumanis - Sumpur Kudus	PT. Karya Abadi Jaya Utama
100	84	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Sinamar Transport Mandiri
101	85		PT. Zona Sikumbang Jaya

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
		Bukittinggi - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan - Balai Selasa	PT. Famili Ceria Group
			PT. Sinamar Transport Mandiri
102	86	Bukittinggi - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan - Balai Selasa - Tapan	PT. Zona Sikumbang Jaya
			PT. Famili Ceria Group
			PT. Sinamar Transport Mandiri
103	87	Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	PT. Melsy Anugrah Transport
104	88	Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat	PT. Famili Ceria Group
			PT. Khatulistiwa Bonjo Pusako
105		Bukittinggi - Kumpulan - Malampah - Pd. Sawah - Kinali - Sp. Empat	-
106	89	Bukittinggi - Kumpulan - Malampah - Pd. Sawah - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Famili Ceria Group
107	90	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Kinali - Sp. Empat	PT. Bintang Rosa Transport
108	91	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Kinali - Sp. Empat - Talu	PT. Famili Ceria Group
109	92	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading	PT. Harmoni Lubuk Basung

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
110	93	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Famili Ceria Group
			PT. Bintang Pasaman Express
111	94	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Uj. Gading - Desa Baru	PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Famili Ceria Group
112	95	Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat - Sasak	PT. Famili Ceria Group
113	96	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Lb. Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh	PT. Tri Saudara Ekspres
114	97	Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Lb. Selasih - Pd. Aro	PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Ricky Rajo Transport
115	98	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Sp. Koto Baru - Ampalu	PT. Tampalo Prima Group
116		Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Sei. Dareh - Koto Baru - Tj. Simalidu	-
117	99	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Silvia Indah Mandiri
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
			PT. Danau Raya Ibu
			PT. Tampalo Prima Group
118	100	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Abai Siat - Sitiung	PT. Muaro Jaya Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
119	101	Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Timpeh	PT. Tampalo Prima Group
120	102	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok	PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Carano Minang Transpor
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
121		Payakumbuh - Piladang - Rao Rao - Batusangkar - Talawi - Sawahlunto	-
122		Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto	--
123		Payakumbuh - Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping	-
124	103	Payakumbuh - Gadut - Halaban	PT. Putra Adios Transport
			PT. Talago Jaya Prima
125	104	Payakumbuh - Limbanang - Suliki	PT. Putra Agung Sepakat
			PT. Putra Adios Transport
			PT. Talago Jaya Prima
126	105	Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	PT. Putra Agung Sepakat
			PT. Putra Adios Transport
			PT. Talago Jaya Prima
127	106	Payakumbuh - Suliki - Baruh Gunung	PT. Putra Adios Transport
128	107	Payakumbuh - Limbanang - Mahat	PT. Putra Adios Transport
129	108	Payakumbuh - Batu Hampar - Suayan	PT. Putra Adios Transport
130		Payakumbuh - Taeh - Mungka	-
131		Payakumbuh - Pd. Lawas - Talang Maur	-
132		Payakumbuh - Tj. Pauh - Pkl. Koto Baru	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
133	109	Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Gn. Malintang - Ma. Peti	PT. Kapur Indah Abadi
134		Payakumbuh - Pkl. Koto Baru - Tj. Pauh (Batas Riau)	-
135	110	Payakumbuh - Halaban - Balai Tangah	PT. Yudha Transport Ekspres
136	111	Payakumbuh - Tj. Alam - Tabek Patah - Batusangkar	PT. Yudha Transport Ekspres
			PT. Grand Son Indah
			PT. Harapan Mama Transport
			PT. Minang Jaya Transport
			PT. Haji Maswardi Sekeluarga
137		Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Muaro - Sijunjung	-
138		Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Tj. Gadang - Kiliranjao	-
139	112	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Zona Sikumbang Jaya
			PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Ricky Rajo Transport
			PT. Sarah Nursyifa Transport
140	113	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Balai Selasa	PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Ricky Rajo Transport
			PT. Sarah Nursyifa Transport
141	114	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Padang - Pasar Baru - Balai Selasa - Tapan	PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Ricky Rajo Transport
			PT. Sarah Nursyifa Transport
142	115	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin - Pariaman	PT. Ayah Ibu Transport
			PT. Melsy Anugrah Transport
			PT. Sarah Nursyifa Transport

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
143		Payakumbuh - Bukittinggi - Kumpulan - Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat	-
144	116	Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Tampalo Prima Group
145	117	Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Ayah Ibu Transport PT. Multi Karya Setangkai PT. Rencana Baru Transport PT. Tampalo Prima Group
146	118	Payakumbuh - Sitangkai - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai - Kt. Besar	PT. Sinamar Transport Mandiri
147		Padang Panjang - Kayu Tanam - Sicincin	-
148	119	Padang Panjang - Kubu Kerambil - Simabur - Batusangkar	PT. Karya Abadi Jaya Utama PT. Silvia Indah Mandiri
149		Solok - Sawahlunto	-
150		Solok - Ombilin - Bukik Siangok - Batusangkar	-
151	120	Solok - Ombilin - Kubu Kerambil - Simabur - Batusangkar	PT. Yanti Citra Pelangi
152		Solok - Sumani - Sulit Air - Tj. Balik	-
153	121	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang	PT. Danau Raya Ibu PT. Tri Saudara Ekspres

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
154	122	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Tl. Babungo	PT. Tri Saudara Ekspres
155	123	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung	PT. Danau Raya Ibu
			PT. Muaro Jaya Transport
156		Solok - Ma. Panas - Bukik Sileh - Kp. Bt. Dalam - Alahan Panjang - Surian - Muara Labuh	-
157	124	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh	PT. Mekar Maju Ekspress
158	125	Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh - Pd. Aro	PT. Tri Saudara Ekspres
			PT. Mekar Maju Ekspress
			PT. Usaha Murni Pratama
159		Solok - Lubuk Selasih - Alahan Panjang - Ma. Labuh - Liki - Leter W	-
160	126	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Rencana Baru Transport
			PT. Tampalo Prima Group
161	127	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Abai Siat - Sitiung Iv	PT. Muaro Jaya Transport
162	128	Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Timpeh	PT. Tampalo Prima Group
163		Solok - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Sitiung - Tj. Simalidu	-
164		Sawahlunto - Talawi - Pd. Ganting - Batusangkar	-
165		Sawahlunto - Tj. Ampalu - Sijunjung	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
166	129	Sawahlunto - Ma. Kalaban - Solok - Lubuk Selasih - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Tampalo Prima Group
167		Malalak - Tandikek - Sp. Koto Mambang - Sicincin	-
168	130	Lubuk Basung - Maninjau - Matur - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Pd. Sibusuk - Sijunjung	PT. Tampalo Prima Group
169		Malalak - Tandikek - Sp. Koto Mambang - Sariak - Pariaman	-
170	131	Lubuk Basung - Pariaman - Sicincin - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Tampalo Prima Group
171		Lubuk Sikaping - Panti - Talu - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	-
172	132	Rao - Panti - Talu - Sp. Empat - Uj. Gading - Air Bangis	PT. Famili Ceria Group
173	133	Lubuk Sikaping - Bukittinggi - Padang Panjang - Ombilin - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Tampalo Prima Group
174		Batusangkar - Talawi - Sawahlunto - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao	-

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
175	134	Batusangkar - Padang Panjang - Padang - Pasar Baru - Painan	PT. Batusangkar Indah Transport
176		Batusangkar - Padang Panjang - Sicincin - Sei. Sarik - Pariaman	-
177	135	Batusangkar - Padang Panjang - Bukittinggi - Maninjau - Lubuk Basung - Manggopoh - Sp. Empat	PT.Helmi Putra Transport
178	136	Batusangkar - Balai Tangah - Tj. Ampalu - Sijunjung - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	PT. Doris Abadi Transport
179	137	Sijunjung - Pd. Sibusuk - Solok - Padang Panjang - Pariaman	PT. Melsy Anugrah Transport
180		Pariaman - Padang Panjang - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	-
181		Ma. Labuh - Alahan Panjang - Lubuk Selasih - Solok - Kiliranjao - Koto Baru - Sei. Rumbai	-
182	138	Cadangan	PT. Harun Panduko Sati (Hps)
			PT. Laksmana Prov
			PT. Laksmana Tbk
			PT. Pelita Indah Travel
			PT. Putra Salam Prima
			PT. Putra Adios Transport
			PT. Yudha Transport Ekspres
			PT. Karya Abadi Jaya Utama
			PT. Trans Mitra Ibu

Jumlah kebutuhan trayek	Jumlah trayek yang dilayani	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan
			PT. Emkazet Sejahtera Lestari
			PT. Melsy Anugrah Transport
			PT. Tranex Graha Perkasa Mandiri
			PT. Bintang Rosa Transport
			PT. Lubuk Basung Express
			PT. Penampung Jaya Lemersing
			PT. Harmonis Ceria Wisata
			PT. Bahagia Family Express
			PT. Talago Jaya Prima
			PT. Sinamar Transport Mandiri
			PT. Bintang Utara Transport
			PT. Tanjung Jaya Mutiara
			PT. Multi Karya Setangkai
			PT. Batusangkar Indah Transport
			PT. Danau Raya Ibu
			PT. Jasa Malindo Ibu
			PT. Tampalo Prima Group
183	139	Padang - Lubuk Alung - Pauh Kamba - Pariaman	PT. Oto Kawan Transport
Jumlah = 183	Jumlah = 139		

Sumber Data : Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas terdapat 139 lintasan trayek yang dilayani oleh perusahaan angkutan pada tahun 2024.

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot linta}}{\text{jumlah kebutuhan lntas penyeberangan pada provinsi tersebut}}$$

$$= \frac{4 \times 0{,}5}{4}$$

$$= 0{,}5$$

Penjelasan:

Untuk kondisi angkutan penyeberangan di wilayah Sumatera Barat saat ini terdiri dari 4 (empat) lintasan trayek, dan untuk ke 4 (empat) Lintasan tersebut sudah dilayani oleh angkutan penyeberangan.

Tabel III. 4 Lintasan angkutan penyeberangan di Sumatera Barat

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi
1.	Padang – Tua Pejat	Komersil	2 kali / seminggu
2.	Padang – Sikakap	Komersil	2 kali / seminggu
3.	Padang –Sikalabuan	Perintis	1 kali / seminggu
4.	Padang – Siberut	Perintis	1 kali / seminggu

Sumber data: Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Setelah didapatkan nilai IK 1 dan IK 2, berikut ini didapatkan Rasio konektvitas Provinsi Tahun 2024 = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

= (0,760 x 70) + (0,5 x 30)
= 53,2 + 15
= 68,2 / 0,682

Rasio Konektivitas 0,682 artinya sebayak 68,2 % wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan laut.

Capaian indikator kinerja tujuan (Rasio Konektivitas) yaitu 99,71%, merupakan capaian yang memuaskan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 99,11 %, capaian rasio konektivitas mengalami kenaikan 0,60% di tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan capaian, rasio konektivitas tahun 2024 juga tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah Sumatera Barat semakin baik untuk penyediaan pelayanan transportasinya.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini

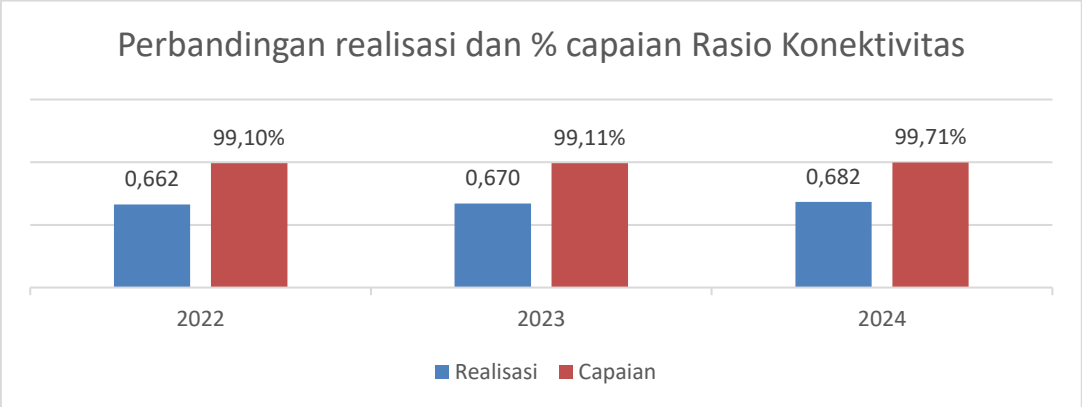

Gambar III. 2 Grafik Perbandingan realisasi dan % capaian Rasio Konektivitas

Sumber data : data diolah

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), rasio konektivitas ditargetkan 0,695, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 0,682,

maka capaian rasio konektivitas sudah 98,13 % dari target tahun terakhir RPJMD 2021 – 2026).

Untuk perbandingan rasio konektivitas dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 5 Perbandingan rasio konektivitas dengan Kementerian Perhubungan

Objek Perbandingan	Nasional (Kementerian Perhubungan)	Sumatera Barat
Sasaran Strategis	Sasaran 1 : Terwujudnya Konektivitas Dan Aksesibilitas Nasional	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
IKU	Rasio Konektivitas Dan Aksesibilitas Nasional	Rasio Konektivitas
Target	2023 = 0,763 2024 = 0,781	2023 = 0,676 2024 = 0,684
Realisasi	2023 = 0,76 (99,61 %) 2024 = 0,57 (72,98) **Kondisi Oktober**	2023 = 0,670 (99,11 %) 2024 = 0,682 (99,70)

Sumber data terkait target dan realisasi Kementrian Perhubungan: http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian/iku/2024/001/001

Dalam penghitungan rasio konektivitas Kementerian perhubungan memiliki rumus sendiri dalam penghitungannya, yaitu meliputi Konektivitas Transportasi Darat, Konektivitas Transportasi Laut, Konektivitas Transportasi Udara, Konektivitas Transportasi Perkeretaapian, Konektivitas Transportasi Perkotaan, sedangkan untuk pemerintah daerah yang berada di bawah Kemendagri berpatokan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tidak tercapai nya target rasio konektivitas pada tahun 2024 ini disebabkan beberapa hal, salah satunya yaitu masih adanya trayek – trayek yang tidak lagi dilalui oleh operator yang beroperasi serta masih adanya perusahaan angkutan umum yang belum melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam mengurus proses perizinan, sehingga izinnya tidak ada.

Upaya yang bisa dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat melalui Dinas Perhubungan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kepadavpengusaha angkutan umum untuk mengisi trayek – trayek yang sudah tidak dilalui oleh operator yang beroperasi
- Melakukan pengawasan angkutan AKDP dan AJDP serta angkutan lainnya dimana untuk pengawasannya langsung ke perusahaan angkutan serta memberikan teguran kepada pengusaha angkutan yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek

3.3.1.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi" dengan 2 buah indikator kinerja:

1. Jumlah trayek yang diakses
2. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Sasaran strategis "meningkatnya pelayanan jasa transportasi" berarti merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan efisiensi layanan transportasi umum bagi masyarakat. Sasaran strategis ini diukur dengan jumlah trayek yang diakses dan jumlah penumpang terangkut angkutan umum, yang mencerminkan seberapa baik transportasi umum melayani kebutuhan masyarakat.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 6 Target dan realisasi sasaran strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah trayek yang diakses	6 Trayek	6 Trayek	100 %
		2. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang	20.248.342	101,24%
Capaian sasaran strategis					100,62 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan jasa transportasi di Sumatera Barat pada tahun 2024, yaitu dengan rata-rata sebesar 100,62 % dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik, serta dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu) semuanya mencapai target.

Selanjutnya analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 yang diukur oleh 2 buah indikator kinerja sasaran dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Jumlah Trayek yang diakses

Jumlah Trayek yang di Akses di tahun – n

Indikator pertama untuk mengukur sasaran strategis 1 adalah jumlah trayek yang diakses.

Jumlah trayek yang diakses digunakan untuk mengukur seberapa banyak rute atau jalur angkutan umum yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk tahun 2024 target berdasarkan renstra yaitu 6 trayek, dan dapat terealisasi sebesar 6 trayek dengan capaian kinerja 100 %. Hal itu dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan Dinas Perhubungan berupa rekomendasi trayek angkutan perintis, adanya pengawasan angkutan yang telah beroperasi, dan didorong dengan adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan, serta telah dilakukannya survei – survei terkait angkutan di Sumatera Barat yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan nantinya.

Target jumlah trayek yang diakses tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Trayek angkutan perintis Damri*

   Angkutan perintis damri merupakan angkutan di beberapa rute pelosok di Sumatera Barat, beroperasinya angkutan perintis untuk menghubungkan antara daerah terpelosok, karena tidak adanya penyelenggaraan layanan transportasi lainnya dan secara aspek bisnis belum atau tidak menguntungkan.

   Adapun untuk pengadaan sarana bus perintis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan dioperasikan oleh Perum Damri. Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan perintis, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selalu berkoordinasi dengan pihak operator, Pemerintah Kab / Kota untuk mengetahui faktor – faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan perintis sehingga dapat diambil langkah – langkah didalam pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

   Berikut ini jaringan trayek angkutan jalan perintis Tahun 2024

Tabel III. 7 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024;

Trayek yang dilayani	Jarak (Km)	Kab / Kota
Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III	41	Dharmasraya
Pulau Punjung - Sikabau - Simp. 3 Koto Baru – Ampalu	40	Dharmasraya
Padang Aro – Uluh Suliti	62	Solok Selatan
Tua Pejat - Sioban (Kab. Kepulauan Mentawai)	45	Kab. Kep. Mentawai
Pariaman - Urek Kaji - P.Kambar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	24	Kab Padang Pariaman
Poltekpel Sumbar - Pasar Usang - Lubuk Alung - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	31	Kab Padang Pariaman
Terminal Simpang IV - Bateh Samui	96	Pasaman Barat

Sumber data: Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2. *Trayek AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi)*

Angkutan Antar kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten / kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Barat 2024 terdapat 183 trayek, sesuai yang dijelaskan pada indikator kinerja tujuan Rasio Konektivitas pada tabel III.3 (halaman 18)

3. *Trayek AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)*

AJDP adalah angkutan antar jemput melalui Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Berikut ini realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 8 Realisasi izin trayek AJDP per jaringan trayek di provinsi sumatera barat

No	Kode trayek	Lintasan trayek
1	1112410	Padang – surantih
2	5111201	Padang – bukittinggi
3	5111301	Padang – payakumbuh
4	5111401	Padang - padang Panjang
5	5111501	Padang – solok
6	5111601	Padang – sawahlunto
7	5111701	Padang - padang sago
8	5111801	Padang – palembayan
9	5111802	Padang - lubuk basung
10	5111901	Padang - lubuk sikaping
11	5111902	Padang - kab. Pasaman
12	5112001	Padang - koto tinggi
13	5112002	Padang - baruh gunung
14	5112003	Padang – mungka
15	5112004	Padang – suliki
16	5112101	Padang – batusangkar
17	5112201	None
18	5112401	Padang – painan
19	5112402	Padang – kambang
20	5112403	Padang – indrapura
21	5112404	Padang - lunang silaut
22	5112411	Padang - air haji
23	5112412	Padang -tapan
24	511245	Padang – bayang

No	Kode trayek	Lintasan trayek
25	511246	Padang – surantih
26	511247	Padang - balai selasa
27	5112501	Padang – pariaman
28	5112601	Padang - kab. Pasaman barat
29	5112701	None
30	5112801	Padang - sei.rumbai
31	5121701	None
32	5121801	Bukittinggi - lubuk basung
33	5121802	Bukittinggi – rao
34	5121901	Bukittinggi- lubuk sikaping
35	5121902	Bukittinggi – rao
36	512193	Bukittinggi - kab. Pasaman
37	512194	Bukittinggi - kab. Pasaman
38	5122201	None
39	5122601	Bukittinggi - air bangis
40	5122602	Bukittinggi – talu
41	5122603	Bukittinggi - pasaman barat
42	5122801	Bukittinggi - sei. Rumbai
43	5142401	None
44	5142601	None
45	5142801	None
46	5181801	Padang - lubuk sikaping

Sumber data : Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

4. *Trayek angkutan laut perintis*

Angkutan laut adalah angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.

Angkutan laut perintis sebagai salah satu penopang terhadap kehidupan ekonomi didaerah yang memiliki wilayah perairan terpencil, terisolir, dan terluar dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Tabel III. 9 Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2023

Armada Kapal	Trayek	Ket
KM. Sabuk Nusantara 37 1.200 GT (tonase kotor)	**Trayek R-3** Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 40 - Siberut / Mailepet - 26 - Sikabaluan / Pokai - 12 - Labuhan Bajau - 40 - Sigologolo - 17 - Saeru - 34 - P.Tello - 48 - Teluk Dalam - 97 - Sibolga - 97 - Teluk	R3 = lama hari berlayar adalah 13 hari dengan 28 voyage, 984 mil

Armada Kapal	Trayek	Ket
	dalam - 48 - P.Tello - 34 - Saeru - 17 - Sigologolo - 80 - Air Bangis - 92 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabaluan / Pokai - 26 - Siberut / Mailepet - 40 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	
KM. Sabuk Nusantara 68 2.000 GT (tonase kotor)	**Trayek R-4** Teluk Bayur - 89 - Labuhan Bajau - 12 - Sikabaluan / Pokai - 12 - Muara Saibi / Subeleng - 14 - Siberut / Mailepet - 20 - Peipei / Mabukkuk - 30 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 40 - Panasahan - 72 - Tua Pejat - 18 - Sioban - 33 - Pasapuat - 13 - Sikakap - 62 - Sinakak - 62 - Sikakap - 90 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur - 120 - Sikakap - 13 - Pasapuat - 33 - Sioban - 16 - Tua Pejat - 72 - Panasahan - 40 - Teluk Bayur	R4 = lama hari berlayar adalah 14 hari dengan 25 voyage, 1013 mil

Sumber data: Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

5. Trayek Kapal Penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Kondisi Angkutan penyeberangan di wilayah Sumatera Barat saat ini melayani 4 (empat) Lintasan dari Kota Padang – Kab. Kep. Mentawai, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan sembilan bahan pokok,

Tabel III. 10 Lintasan kapal penyeberangan Sumatera Barat

Nama Lintas	Jarak (Mil)
Padang – Siberut	82
Siberut – Tua Pejat	62
Tua Pejat – Sikakap	74,6
Padang – Sikabaluan	90

Sumber data : Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

6. Trayek / jaringan jalur Kereta Api

Berikut ini jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat

Tabel III. 11 Jaringan jalur kereta api Nasional di Sumatera Bagian Barat tahun 2024

No	Kelas KA	Nama Kereta Api	Jumlah KA	Jenis perjalanan	Lintasan Pelayanan
Jenis Pelayanan : Ekonomi					
1	Ekonomi	KA Pariaman Exspres	9	8 reguler 1 fakultatif	Naras - Pauh Lima Padang – Naras
	Bandara	KA Minang Kabau Ekspress	12	12 Reguler	BIM - Pulau Air
	KRD Ekonomi	KA Lembah Anai	6	6 reguler	Kayu Tanam - Duku – BIM
	Wisata	KA Mak Itam	2	2 Fakultatif	Sawahlunto - Muaro Kalaban
	Jumlah		**29**	**29**	
Jenis Pelayanan : Barang					
2	Semen Klinker	KA Karang Putiah	34	24 reguler 10 fakultatif	Bukit putus – Indarung
	CPO	KA Nabutus CPO	2	2 Fakultatif	Bukit putus – Naras
	Jumlah		**36**	**36**	

Sumber data: Bidang APP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja jumlah trayek yang diakses tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Trayek yang di Akses dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	6 trayek	6 trayek	100 %
2022	6 trayek	6 trayek	100 %
2023	6 trayek	6 trayek	100 %
2024	6 trayek	6 trayek	100 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Indikator kinerja jumlah trayek yang diakses dengan target berdasarkan renstra yaitu sebesar 6 Trayek pada tahun 2021 – 2024, dan dapat terealisasi sebesar 6 Trayek dengan capaian kinerja 100 %. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan pada tahun 2024 berupa pengawasan pada semua trayek – trayek angkutan yang ada di Sumatera Barat.

Kemudian untuk target pada tahun akhir renstra 2026, yaitu 6 trayek, dan diharapkan sampai pada tahun 2026 (Tahun akhir renstra 2021 – 2026) semua jaringan trayek dapat diawasi dengan baik agar pelayanan angkutan semakin bagus.

Untuk indikator kinerja jumlah trayek yang diakses tidak terdapat perbandingan dengan standar Nasional, indikator jumlah trayek yang diakses mendukung capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu Rasio Konektivitas, dimana pada penjelasan sebelumnya sudah disampaikan perbandingan Rasio Konektivitas Sumatera Barat dengan standar Nasional yaitu Kementerian Perhubungan.

Berikut ini faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian indikator kinerja jumlah trayek yang diakses

Tabel III. 13 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah trayek yang diakses

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Adanya koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan angkutan yang dilakukan	Dari kegiatan pengawasan didapat informasi terkait kondisi sarana dan prasarana angkutan yang masih belum maksimal	Sudah dilakukannya upaya – upaya kooordinasi maupun upaya secara bersurat kepada stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan, maupun kanwil Perhubungan yang berlokasi di Sumatera Barat selaku pelaksana kegiatan angkutan (BPTD Wil III Sumbar,Balai Teknik Perkeretaapian, KSOP), maupun koordinasi kepada Operator angkutan (PT KAI, Perum Damri, dll)	Upaya perbaikan kedepannya dalam ketercapaian indikator kinerja jumlah trayek yang diakses adalah sebagai berikut: 1. Angkutan perintis Damri Akan dilakukan koordinasi dengan Kab / Kota, operator angkutan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku penyelenggara angkutan perintis terkait lintasan / trayek baru, sehingga pelayanan angkutan perintis tepat sasaran (lintasan yang benar – benar menjadi lintasan yang belum dilayani) sehingga diharapkan angkutan perintis nantinya sebagai pemutus mata rantai kesenjangan keterbatasan penyediaan layanan umum di bidang transportasi 2. Angkutan AKDP dan AJDP Akan dilakukan upaya untuk mengingatkan perusahaan untuk lebih teliti dalam melengkapi dan mengajukan persyaratan ke Dishub, sehingga proses penerbitan rekomendasi teknis perizinan angkutan umum dapat berjalan dengan lancar, dan angkutan AKDP dan AJDP dapat beroperasi sesuai standar, serta akan menyampaikan informasi terkait trayek yang sudah tidak dilalui oleh angkutan kepada operator angkutan, sehingga

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
			trayek tersebut dapat diisi oleh operator angkutan yang ada 3. Angkutan laut perintis dan angkutan penyeberangan Akan dilakukan upaya pembahasan usulan jaringan trayek angkutan laut dan angkutan penyeberangan yang dapat mengurangi rantai kesenjangan keterbatasan penyediaan layanan umum di bidang transportasi laut, serta melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengembangan pelabuhan dan angkutan pelayaran di Sumatera Barat

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2. Indikator Kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Jumlah penumpang terangkut di Terminal Tipe B pada tahun-n

Indikator kedua untuk mengukur sasaran strategis 1 adalah jumlah penumpang terangkut angkutan umum. Untuk indikator kinerja ini data diperoleh dan didapatkan dari rekapan penumpang terangkut di 5 Terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat, yaitu:

a) Terminal Tipe B Bukit Surungan Kota Padang Panjang
b) Terminal Tipe B Koto Nan IV Kota Payakumbuh
c) Terminal Tipe B Piliang Kab Tanah Datar
d) Terminal Tipe B Sago Painan Kab Pesisir Selatan
e) Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 penetapan target jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2024 adalah sebanyak 24.000.000 penumpang terangkut, namun Dinas Perhubungan melakukan perubahan target pada perjanjian kinerja kepala OPD menjadi 20.000.000, untuk penetapan target perubahan ini dengan mempertimbangkan data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2023, dan setelah berkoordinasi dengan Biro Organisasi maka dilakukan perubahan pada perjanjian kinerja kepala OPD tahun 2024.

Untuk realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2024 adalah 20.248.342 dengan capaian 101,24 %.

Berikut data jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada masing – masing terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat:

Tabel III. 14 Data Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum 2024

Terminal Tipe B	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
Padang Panjang	7.822.045
Payakumbuh	4.286.961
Tanah Datar	2.729.590
Sawahlunto	3.160.137
Painan	2.249.611
Total	20.248.342

Sumber data : UPTD Terminal Tipe B wilayah 1 dan wilayah 2 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 15 Perbandingan jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Jumlah **penambahan** penumpang terangkut	Jumlah penumpang terangkat angkutan umum		
Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	1.000.000	19.000.0000	18.500.000	20.000.000
Realisasi	1.127.254	18.650.112	18.906.971	20.248.342
% Capaian	113%	98,15%	102,19%	101,24 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk indikator kinerja ini terdapat perbedaan antara tahun 2021 (Renstra 2016 – 2021) dengan tahun 2022 - 2024 (Renstra 2021 – 2026), dimana untuk tahun 2021 indikator kinerjanya yaitu jumlah **penambahan** penumpang terangkut, sedangkan untuk tahun 2022 – 2024 indikator kinerjanya yaitu Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum.

Namun untuk data realisasi penumpang terangkut pada tahun 2021 dapat diperoleh pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Dishub 2021 yaitu sebanyak 18.127.254 orang. Untuk perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Gambar III. 3 Perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Sumber data : data diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan jumlah penumpang terangkut pada tahun 2022, 2023, dan tahun 2024

Untuk perbandingan realisasi jumlah penumpang terangkut angkutan umum Tahun 2024 dengan target pada tahun akhir renstra 2021 – 2026 yaitu untuk target untuk jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2026 (tahun akhir renstra) adalah sebanyak 24.000.000, untuk realisasi pada tahun 2024 ini yaitu sebesar 20.248.342 orang, dan jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra (2026), maka capaiannya baru sebesar 84,37 %, sehingga hal ini nantinya akan dilakukan upaya – upaya peningkatan realisasi pada tahun – tahun selanjutnya (2025 – 2026).

Untuk indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum tidak terdapat perbandingan dengan standar Nasional maupun dengan provinsi lain, karena indikator ini merupakan jumlah penumpang terangkut pada 5 terminal kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan targetnya berdasarkan renstra tahun 2021 – 2026.

Berikut ini analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum tahun 2024

Tabel III. 16 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja jumlah penumpang terangkut angkutan umum

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Adanya upaya meningkatkan minat	• Terputusnya jalan padang – bukittinggi via	Solusi yang telah dilakukan mengatasi faktor	Upaya perbaikan kedepannya untuk ketercapaian indikator kinerja jumlah penumpang

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
masyarakat menggunakan angkutan umum, yaitu meningkatkan dan memperbaiki fasilitas Terminal Tipe B	Silaiang pada bulan Mei dan Juni sehingga kendaraan dialihkan ke jalan alternatif via malalak, sehingga mengganggu operasional di terminal Kota Padang Panjang • Adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar terminal • Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum	penghambat yang ada yaitu • Melakukan koordinasi dengan BPJN terkait percepatan perbaikan jalan via silaiang • Telah dilakukan pengawasan (Razia) yang dilakukan di terminal terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek serta angkutan yang tidak laik jalan, kemudian kepada sopir angkutan juga diarahkan untuk selalu memasuki wilayah terminal dalam menaikkan dan menurunkan penumpang	terangkut angkutan umum adalah sebagai berikut: • Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe B (fasilitas utama dan penunjang) • Meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, yaitu: a) Peningkatan kualitas layanan angkutan umum dengan melakukan pengawasan angkutan (Razia) terhadap angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek serta angkutan yang tidak laik jalan b) Meningkatkan pelayanan di Terminal melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM di terminal tipe B, baik yang bersifat internal maupun eksternal • Selain hal diatas, berikut ini upaya jangka panjang yang juga bisa dilakukan dalam upaya peningkatan jumlah penumpang yang diangkut: a) Perencanaan transportasi terpadu: Pemerintah provinsi dapat mengembangkan rencana transportasi terpadu yang mencakup pengembangan sistem AKDP yang efisien dan berkelanjutan. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan mobilitas masyarakat, perencanaan rute, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya. b) Kebijakan Tarif yang Terjangkau: Pemerintah provinsi dapat mengatur kebijakan tarif yang terjangkau untuk meningkatkan daya saing AKDP dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 12 sub kegiatan.

Dari keseluruhan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp.18.491.134.178 yang meliputi belanja penunjang dan urusan, terdapat anggaran pada sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp 1.274.606.290,-.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 17 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	171.459.000	170.723.396	99,57%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	43.004.000	39.532.790	91,93%
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	82.693.871	66.324.174	80,20%
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	11.943.000	11.887.716	99,54%
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	17.320.300	15.541.699	89,73%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	1.690.000	1.690.000	100,00%

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% capaian
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	26.439.900	22.728.300	85,96%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	109.609.200	109.463.829	99,87%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	46.558.800	43.683.676	93,82%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.441.200	3.439.200	99,94%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	46.745.550	46.590.984	99,67%
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	645.419.119	643.049.813	99,63%
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.174.600	9.632.434	94,67%
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22.389.700	22.352.800	99,84%
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	35.718.050	34.931.600	97,80%
Total	1.274.606.290	1.241.572.411	97,41%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(Pagu\ Anggaran\ X\ Capaian\ Kinerja) - Realisasi\ Anggaran}{(Pagu\ Anggaran)} \text{ x } 100\ \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efesiensi, tingkat efesiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

Nilai Efesiensi = 50%+((tingkat efesiensi)/20 x 50)

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi

Tabel III. 18 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efesiensi Kinerja	Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%)
				(((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50
Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1.274.606.290	1.241.572.411	100,62%	0,03	58,03%

Sumber data: data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran sebesar 97,41 %. Hal tersebut menunjukan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

Dari sisa anggaran sebesar Rp. 33.033.879 merupakan efisiensi terhadap belanja BBM, perjalanan dinas, makan minum rapat, serta belanja lembur terminal

3.3.2 Indikator Kinerja Tujuan (Rasio angka Kecelakaan lalu lintas)

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan memiliki tujuan terwujudnya keselamatan transportasi dengan indikator kinerja tujuan adalah rasio angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Renstra tahun 2021 – 2026, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan target rasio angka kecelakaan lalu lintas tahun 2024 adalah sebesar 8,88. Kemudian untuk realisasi tahun 2024 adalah 7,42, sehingga untuk rasio angka kecelakaan lalu lintas tercapai dengan capaian 116,44 % (Indikator rasio angka kecelakaan lalu lintas akan lebih bagus ketika nilainya semakin kecil, yang menggambarkan angka kecelakaan lalu lintas semakin menurun).

Dalam upaya menekan angka kecelakaan, pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan angka kejadian kecelakaan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK).

Berdasarkan RUNK tersebut keberhasilan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bisa dilihat dari rasio angka kecelakaan yang merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan dengan paremeter tertentu, seperti jumlah penduduk, jumlah kendaraan, atau jarak tempuh, yang hasilnya dapat menggambarkan gambaran proporsi kecelakaan dalam suatu konteks tertentu, membantu analisis dan perbandingan risiko kecelakaan di berbagai wilayah.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja tujuan rasio angka kecelakaan lalu lintas, melihat terwujudnya keselamatan transportasi menggunakan indikator angka kematian per 100.000 populasi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan kinerja keselamatan jalan.

Berikut ini penghitungan rasio angka kecelakaan pada tahun 2024:

Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas

$$= \frac{\text{Jumlah total kematian lalu lintas dalam setahun x } 100.000}{\text{Jumlah penduduk di daerah tersebut}}$$

$$= \frac{433 \text{ x } 100.000}{\mathbf{5.836.210}}$$

$$= 7{,}42$$

Berdasarkan data diatas, diketahui rasio angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 adalah 7,42, yang mana angka ini dapat menggambarkan gambaran proporsi kecelakaan, dan untuk menjadi perbandingan risiko kecelakaan di wilayah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya maupun tahun – tahun selanjutnya. Berikut ini gambaran rasio angka kecelakaan di wilayah Sumatera Barat

Tabel III. 19 Target dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas

Tujuan : Terwujudnya keselamatan transportasi				
Indikator Kinerja : Rasio angka kecelakaan lalu lintas				
Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah total kematian dalam setahun	Rasio angka kecelakaan lalu lintas	
			Target	Realisasi
2020	5.534.472	454	-	8,20
2021	5.580.232	464	10,13	8,32
2022	5.640.629	528	9,62	9,36
2023	5.757.210	480	9,26	8,34
2024	5.836.160	433	8,88	7,42

Sumber data:

- Jumlah penduduk tahun 2021 – 2022 diperoleh dari situs: https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html (Data Tahun 2021-2022 dari situs bersumber dari Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni))
- Jumlah penduduk tahun 2023 diperoleh dari : Buku proyeksi penduduk Kab / Kota Provinsi Sumatera Barat 2020 - 2035 hasil sensus penduduk 2020 yang diterbitkan BPS Provinsi Sumatera Barat yang dirilis bulan Juli tahun 2023
- Jumlah total kematian dalam setahun diperoleh dari data kecelakaan lalu lintas oleh Ditlantas Polda Sumbar

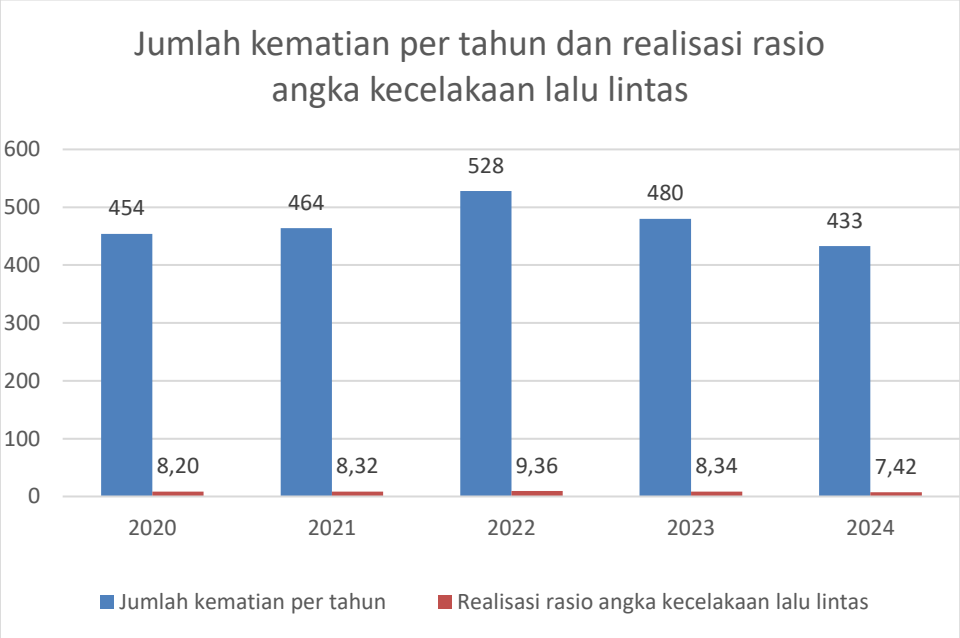

Gambar III. 4 Rekapitulasi Jumlah kematian per tahun dan realisasi rasio angka kecelakaan lalu lintas

Sumber Data : data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat terlihat pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kematian karena kecelakaan dimana pada saat itu masih adanya wabah covid 19 sehingga mengurangi aktivitas masyarakat diluar, kemudian angka kematian meningkat sampai tahun 2022, dan kembali menurun sampai dengan tahun 2024.

Untuk Perbandingan rasio angka kecelakaan lalu lintas dengan standar Nasional, untuk Kementerian Perhubungan indikator kinerja sasarannya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan rasio angka kecelakaan yaitu angka kematian per 100.000 populasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementrian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat belum selaras sepenuhnya, tetapi masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementrian (Pusat).

Faktor pendorong tercapainya indikator ini tidak lepas dari lima pilar aksi keselamatan jalan yaitu:

1. Sistem yang berkeselamatan (Bappeda),
2. Jalan yang berkeselamatan (Dinas BMCKTR),
3. Kendaraan yang berkeselamatan (Dinas Perhubungan),
4. Pengguna jalan yang berkeselamatan (Polri),
5. Penanganan pra dan pasca kecelakaan (Dinkes dan jasa raharja).

Seluruh stakeholder berupaya untuk mewujudkan penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, yang mana hal ini juga sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Keselamatan Jalan (RUNK).

Berdasarkan rencana strategis tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan memiliki tujuan terwujudnya keselamatan transportasi dengan indikator kinerja tujuan adalah rasio angka kecelakaan lalu lintas, kemudian untuk sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi dan indikator kinerja sasarannya yaitu v/c rasio di jalan provinsi

Hubungan antara rasio angka kecelakaan lalu lintas dan kinerja lalu lintas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kinerja lalu lintas mencakup volume kendaraan, kecepatan, kapasitas jalan, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Rasio kecelakaan yang tinggi memungkinkan menunjukkan rendahnya kinerja lalu lintas atau sebaliknya.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi

3.3.2.1. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi" yang dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran V/C Rasio di jalan Provinsi.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 20 Target dan realisasi sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,42	0,41	102,38 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan renstra Dinas Perhubungan target V/C rasio tahun 2024 adalah sebesar 0,48, dan untuk realisasi pada tahun 2023 adalah 0,45, yang berarti target 2024 sudah tercapai pada tahun 2023, karena untuk pengukuran V/C Rasio apabila realisasi semakin tinggi (mendekati 1) maka menunjukan kinerja lalu lintas yang tidak baik. Oleh karena itu Dinas Perhubungan melakukan perubahan target pada tahun 2024 menjadi 0,42 dan dengan realisasi pada tahun 2024 adalah 0,41 dengan capaian sebesar 102,38 %.

1. Indikator Kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Formula Penghitungan = V/C Rasio di jalan Provinsi
= Volume / Kapasitas

Note : Untuk penghitungan kapasitas jalan berdasarkan PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) tahun 2023

Berdasarakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan status ruas jalan menurut fungsi dan statusnya sebagai jalan Provinsi, terdapat 65 ruas jalan provinsi di Provinsi Sumatera Barat.

Namun dari 65 ruas jalan provinsi, terdapat 5 Ruas jalan provinsi yang belum terhubung / belum dapat digunakan secara optimal. Dengan ketersediaan dan keterbatasan anggaran yang dimiliki tidak memungkinkan seluruh ruas dilakukan perhitungan Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi. Pada tahun 2024 dilakukan

perhitungan kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi sebanyak 8 (Delapan) ruas, berikut ini nama ruas yang dihitung serta nilai v/c rasio masing – masing ruasnya:

Tabel III. 21 Penetapan Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Perhitungan Terkait Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2024

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KELAS JALAN	PANJANG JALAN	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
1.	P.083	Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan	III B	44,10 KM	Bungus Teluk Kabung – Koto XI Tarusan	Kab. Pesisir Selatan
2.	P.070	Batusangkar - Ombilin	III B	17,00 KM	Limo Kaum - Rambatan	Kab. Tanah Datar
3.	P.078	Simpang Koto Mambang - Balingka	III B	39,40 KM	Patamuan – IV Koto	Kab. Padang Pariaman – Kab. Agam
4.	P.037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) – Guguk Cino	III B	10,40 KM	Limo Kaum – Pariangan	Kab. Tanah Datar
5.	P.028	Sicincin – Kurai Taji	III B	16,44 KM	2 x 11 Enam Lingkung – Nan Sabaris	Kab. Padang Pariaman
6.	P.033	Simpang Empat - Sasak	III B	20,00 KM	Pasaman – Sasak Ranah Pesisir	Kab. Pasaman Barat
7.	P.079	Simpang Baso - Piladang	III B	10,50 KM	Baso - Akabiluru	Kab. Lima Puluh Kota

Sumber data : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 22 Realisasi kinerja lalu lintas ruas jalan provinsi di provinsi sumatera barat tahun 2024

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	VOLUME TOTAL (smp/jam)	KAPASITAS	V/C RASIO	KETERANGAN
1.	P.083	Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan	987	2222	0,44	VC Ratio dengan nilai 0.44 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	VOLUME TOTAL (smp/jam)	KAPASITAS	V/C RASIO	KETERANGAN
						Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
2.	P.070	Batusangkar - Ombilin	1444	2943	0,49	VC Ratio dengan nilai 0.45 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas
3.	P.078	Simpang Koto Mambang - Balingka	808	1606	0,52	VC Ratio dengan nilai 0.52 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas
4.	P.037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) – Guguk Cino	389	1541	0,25	VC Ratio dengan nilai 0.26 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	VOLUME TOTAL (smp/jam)	KAPASITAS	V/C RASIO	KETERANGAN
5.	P.028	Sicincin – Kurai Taji	507	1542	0,33	VC Ratio dengan nilai 0.33 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil
6.	P.033	Simpang Empat - Sasak	932	2429	0,38	VC Ratio dengan nilai 0.38 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil.
7.	P.079	Simpang Baso - Piladang	555	1541	0,36	VC Ratio dengan nilai 0.38 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus dapat dikatakan stabil.
8.	P.044	Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai	1.803	3320	0,54	VC Ratio dengan nilai 0.54 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf C yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan

NO	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	VOLUME TOTAL (smp/jam)	KAPASITAS	V/C RASIO	KETERANGAN
						dapat dikontrol oleh lalu lintas
RATA – RATA KINERJA RUAS JALAN PROVINSI					0,41	VC Ratio rata - rata dengan nilai 0,41 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasi V/C rasio di ruas jalan provinsi adalah 0,41, sedangkan untuk target adalah 0,42 sehingga persentase capaian dari V/C Rasio adalah sebesar 102,38 %,dikarenakan untuk V/C rasio apabila nilainya semakin besar atau mendekati 1 maka kinerja lalu lintas sebakin buruk.

Dapat diketahui kinerja lalu lintas di ruas jalan Provinsi dengan VC Ratio rata - rata dengan nilai 0,41 menunjukan tingkat pelayanan berada pada huruf B yang berdasarkan Tabel Level Of Service (LOS) berarti Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol

Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 23 Perbandingan V/C Rasio tahun 2021, 2022, dan 2023

Indikator Kinerja V/C Rasio di Jalan Provinsi			
Tahun	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**
2021	0,54	0,52	103,70
2022	0,52	0,53	98,07
2023	0,50	0,45	110
2024	0,42	0,41	102,38

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

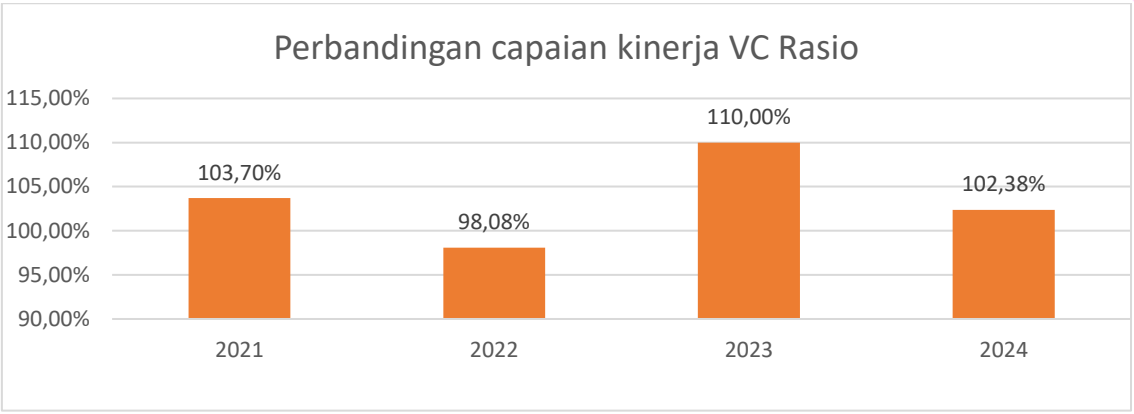

Gambar III. 5 Perbandingan capaian kinerja VC Rasio 2021 - 2024

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas capaian indikator kinerja VC Ratio pada jalan provinsi menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum melebihi target, di mana pada tahun 2021 realisasi 0,52 melampaui target 0,54 (103,70%), tahun 2022 sedikit di bawah target dengan realisasi 0,53 dari target 0,52 (98,07%), tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi 0,45 dibanding target 0,50 (110%), dan tahun 2024 realisasi 0,41 mencapai 102,38%, yang secara keseluruhan mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur.

Untuk perbandingan realisasi kinerja target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dinas perhubungan provinsi sumatera barat yaitu 0,45 (pada tahun akhir renstra 2026), berarti target tahun 2026 sudah tercapai pada tahun 2024 yaitu 0,41. Namun hal ini karena target dalam dokumen perencanaan strategis disusun berdasarkan proyeksi dan kebijakan jangka menengah, bukan sekadar mencerminkan hasil survei terbaru. Selain itu, nilai VC Ratio bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahun tergantung pada berbagai faktor seperti peningkatan volume kendaraan, kapasitas jalan, dan kebijakan lalu lintas. Oleh karena itu, evaluasi lebih difokuskan pada strategi pencapaian target 2026 (0,45) daripada sekadar memperbaiki target tahunan yang sudah ditetapkan

Indikator kinerja V/C Rasio tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional, indikator ini menggambarkan kinerja lalu lintas di ruas jalan yang akan kita survei, tujuannya nanti agar bisa dilakukan perencanaan maupun rekayasa lalu lintas agar kinerja lalu lintas semakin baik, sehingga di IKU Kementerian Perhubungan juga tidak terdapat sasaran maupun indikator terkait v/c rasio

Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja vc rasio

Tabel III. 24 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Adanya upaya – upaya meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik sehingga kinerja lalu lintas menjadi lebih baik	• Masih adanya angkutan atau truk yang ODOL (Over Dimensi Over Load), , sehingga menyebabkan arus kendaraan ODOL tersebut menjadi lambat di jalan raya dan juga mengakibatkan adanya jalan yang rusak, hal itu mempengaruhi kinerja lalu lintas yang ada • Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga Ketika diperjalanan dapat menghambat kinerja lalu lintas yang ada • Adanya angkutan travel liar • Belum optimalnya angkutan umum yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi • Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait keselamatan lalu lintas	Solusi yang sudah dilakukan yaitu: • Adanya upaya penindakan yang dilakukan agar tidak ada lagi angkutan orang / barang yang tidak sesuai standar dan tidak laik jalan, karena hal ini menyebabkan kinerja lalu lintas menurun, seperti kendaraan yang kelebihan muatan akan berjalan lambat, ataupun adanya kecelakaan yang terjadi akibat kelebihan muatan, dll • telah dilakukannya sosialisasi terkait keselamatan LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan)	Berikut adalah beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian V/C rasio a) Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan dokumen rencana induk jaringan jalan, hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan tranportasi di Sumatera Barat b) Upaya memperkuat penegakan hukum terkait aturan lalu lintas dan keamanan jalan, c) Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi keselamatan dan festival aksi keselamatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, berkendara yang bertanggung jawab, dan pemakaian transportasi yang ramah lingkungan yang dapat membantu mengubah perilaku pengguna jalan dan meningkatkan keselamatan serta meningkatkan kinerja lalu lintas.

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 6 sub kegiatan.

Dari keseluruhan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp.18.491.134.178 yang meliputi belanja penunjang dan urusan, terdapat anggaran pada sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis 2 yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp 2.958.647.450,-.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 25 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	171.459.000	170.723.396	99,57%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	916.983.100	911.284.895	99,38%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.657.773.200	1.636.025.806	98,69%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	70.741.800	70.363.038	99,46%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	109.609.200	109.463.829	99,87%
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	32.081.150	31.196.150	97,24%
Total	2.958.647.450	2.929.057.114	99,00%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(Pagu\ Anggaran\ X\ Capaian\ Kinerja) - Realisasi\ Anggaran}{(Pagu\ Anggaran)} \text{ x } 100\ \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efesiensi, tingkat efesiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

Nilai Efesiensi = 50%+((tingkat efesiensi)/20 x 50)

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi

Tabel III. 26 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efesiensi Kinerja	Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%)
				(((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50
Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi	2.958.647.450	2.929.057.114	102,38%	0,03	58,45%

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

3.3.3 Indikator Kinerja Tujuan (Nilai Akuntabilitas Kinerja)

3.3.3.1. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, diukur dengan 1 buah indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 27 Target dan realisasi sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,00 BB	73,20 BB	101,67 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

1. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi.

Realisasi SAKIP tahun 2024 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2023 dengan nilai adalah BB (73,20). Bila dibandingkan dengan target berdasarkan renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan yaitu BB (72,00), maka dapat diketahui persentase capaian nilai akuntabilitas adalah sebesar 101,67%, ini berarti dalam skala penilaian Sangat Baik.

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas tahun 2021 – 2024 dapat dilihat dari tabel dan grafik dibawah ini

Tabel III. 28 Perbandingan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 - 2023

Target				Realisasi			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2023
BB (70,00)	BB (71,00)	BB (72,30)	BB (72,00)	BB (70,14)	BB (71,83)	B (66,99)	BB (73,20)

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

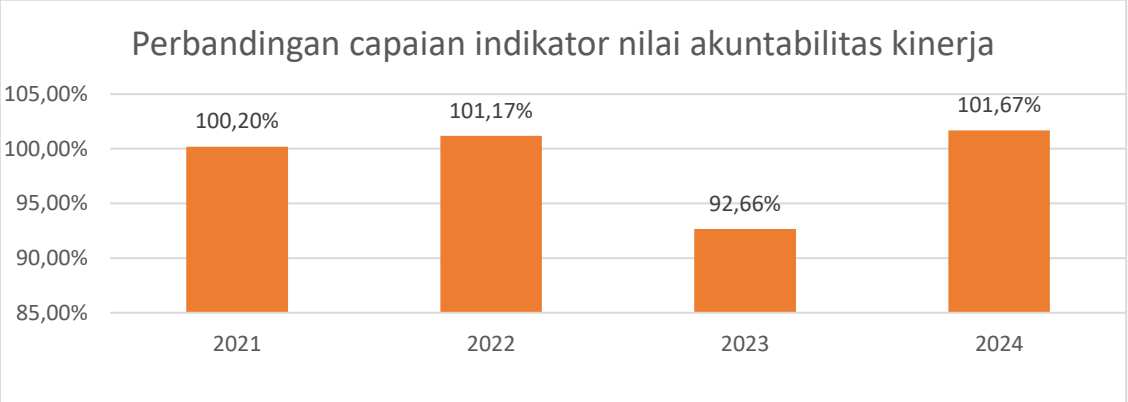

Gambar III. 6 Perbandingan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat terlihat capaian indikator yang fluktuatif, untuk target nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sebesar 72,30 lebih tinggi dari target tahun 2024 sebesar 72,00 dan berbeda dengan Renstra Dinas Perhubungan yaitu 71,50, hal ini karena pada capaian realisasi tahun 2022 sudah melewati target tahun 2023 sebesar 71,83 sehingga dilakukan perubahan target pada tahun 2023, namun untuk tahun 2024 kembali mengikuti target renstra yaitu 72,00 dikarenakan pada tahun 2023 realisasi hanya 66,99.

Untuk keadaan sekarang nilai akuntabilitas kinerja sudah semakin membaik, dan perbandingan realisasi pada tahun 2024 dengan target akhir renstra (2026) yaitu 73,00 sudah melewati target dan akan dilakukan penyesuaian target ditahun selanjutnya.

Untuk indikator ini tidak ada perbandingan dengan standar nasional karena untuk indikator ini merupakan nilai sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel III. 29 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
Faktor pendorong yaitu: 1. Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan 2. Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik 3. Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. 4. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai. 5. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun. 6. Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi) 7. Sudah dilaksanakan sosialisasi dengan narasumber dari BPKP Sumbar	Terkait komponen penilaian SAKIP yaitu evaluasi internal dan pengukuran kinerja masih memiliki nilai yang kurang, dikarenakan masih kurangnya dokumentasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi internal tersebut	Sudah dibuatkan nota dinas dari Kepala Dinas agar masing – masing bidang melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi secara baik dan berjenjang serta dapat terdokumentasi dengan baik	Upaya perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD: 1. Melaksanakan sosialisasi SAKIP secara terpisah dengan target yaitu pejabat struktural dan staf agar meningkatkan kesadaran ASN terkait penilaian SAKIP

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 6 sub kegiatan.

Dari keseluruhan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp.18.491.134.178 yang meliputi belanja penunjang dan urusan, terdapat anggaran pada sub kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis 2 yang berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar Rp 2.958.647.450,-.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 30 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.143.000	76.900.200	98,41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.855.250	101.867.216	94,45%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.569.999	51.520.036	98,00%
Total	238.568.249	230.287.452	96,53%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi = $\frac{(Pagu\ Anggaran\ X\ Capaian\ Kinerja) - Realisasi\ Anggaran}{(Pagu\ Anggaran)}$ x 100 %

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efesiensi, tingkat efesiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

Nilai Efesiensi = 50%+((tingkat efesiensi)/20 x 50)

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi

Tabel III. 31 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 3 meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efesiensi Kinerja	Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%)
				(((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	238.568.249	230.287.452	101,67%	0,05	62,85%

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

3.3.4 Indikator Kinerja Tujuan (Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi)

3.3.4.1. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Sasaran Strategis 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

1. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan masyarakat. Tujuan pelaksanaan ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 32 Target dan realisasi sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	81 %	86,90 %	107,28 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk target berdasarkan Renstra 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah81 %, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2024 sebesar 86,90 % dengan capaian kinerja 107,28 % atau dengan kriteria sangat baik.

Untuk pengukuran capaian indikator kinerja ini, survei dilakukan dengan melakukan penyebaran form kuesioner kepada pihak perusahaan maupun pemohon terkait andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini dasar penilaian kinerja yang dilakukan:

Tabel III. 33 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber data : PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

METODE PENGHITUNGAN:

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2
- Pilihan D bernilai 1

Contoh Cara Perhitungan

Dari 11 Pertanyaan (untuk responden 1 orang) misalnya:

- 4 Pertanyaan dinilai "A" → 4 X 4 = 16
- 3 Pertanyaan dinilai "B" → 3 X 3 = 9
- 3 Pertanyaan dinilai "C" → 3 X 2 = 6
- 1 Pertanyaan dinilai "D" → 1 X 1 = 1

TOTAL 32

Nilai Maksimal 44 (11 pertanyaan x 4)

Nilai IKM = $\frac{32}{44}$ x 100%=72,73 = Mutu Layanan C (Kurang Baik)

Adapun data perusahaan atau pemohon sebagai berikut :

Tabel III. 34 Nama responden dalam pengukuran indikator kinerja sasaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan orhanisasi

No	Nama responden	Lokasi responden
1	CV. Pratama Karya Konsult	
2	PT. Adipa Karya Andalas	Padang
3	PT. Perlite Andalas Lestari	Padang
4	PT. Minang Semesta Alam	Padang

No	Nama responden	Lokasi responden
5	PT. Putra Nusantara Gemilang	Padang
6	CV. Tekad Jaya	Kab. Lima Puluh Kota

Sumber Data : data diolah

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pengolahan data dan perhitungan data hasil survei kepuasan perusahaan atau pemohon menggunakan google form dapat dilihat sebagai berikut:

Pertanyaan 1

Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Tabel III. 35 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 1

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak sesuai	-	-
Kurang sesuai	-	-
Sesuai	50%	50*3 = 150
Sangat sesuai	50%	50*4 = 200
Total		=350/4 = 87,5 Nilai IKM setelah di konversi adalah 87,50 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 2

Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhdap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Tabel III. 36 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 2

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak mudah	-	-
Kurang mudah	-	-
Mudah	50%	50*3 = 150
Sangat mudah	50%	50*4 = 200
Total		=350/4 = 87,5 Nilai IKM setelah di konversi adalah 87,50 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 3

Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhdap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Tabel III. 37 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 3

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak sesuai	-	-
Kurang sesuai	-	-
Sesuai	66,7%	66,7*3 = 200,1
Sangat sesuai	33,3%	33,3*4 = 133,2
Total		=333,3/4 = 83,32 Nilai IKM setelah di konversi adalah 83,32 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 4

Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhdap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Tabel III. 38 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 4

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak cepat	-	-
Kurang cepat	-	-
Cepat	50%	50*3 = 150
Sangat cepat	50%	50*4 = 200
Total		=350/4 = 87,5 Nilai IKM setelah di konversi adalah 87,50 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 5

Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhdap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Tabel III. 39 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 5

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak baik	-	-
Kurang baik	-	-
Baik	50%	50*3 = 150
Sangat baik	50%	50*4 = 200
Total		=350/4 = 87,5 Nilai IKM setelah di konversi adalah 87,50 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 6

Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhdap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Tabel III. 40 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 6

Keterangan	Persentase	Jumlah
Sangat tidak cepat	-	-
Tidak cepat	-	-
Cepat	50%	50*3 = 150
Sangat cepat	50%	50*4 = 200
Total		=350/4 = 87,5 Nilai IKM setelah di konversi adalah 87,50 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Pertanyaan 7

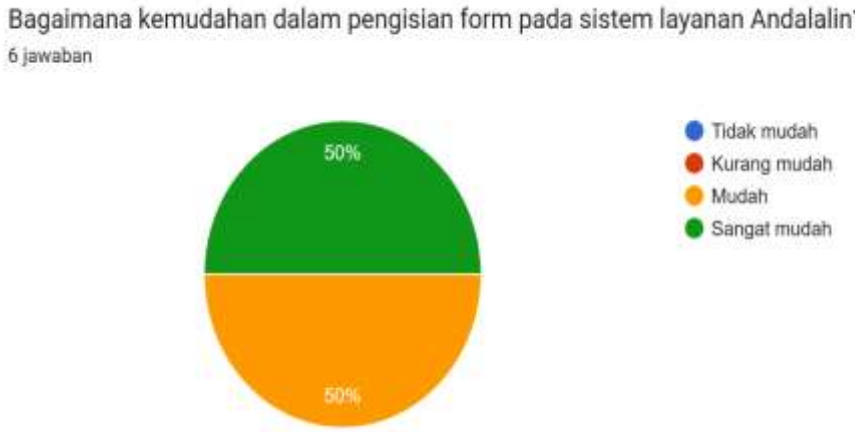

Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhdap unsur-unsur layanan yang dinilai sebagai berikut:

Tabel III. 41 Nilai rata-rata per unsur untuk pertanyaan 7

Keterangan	Persentase	Jumlah
Tidak mudah	-	-
Kurang mudah	-	-
Mudah	50%	50*3 = 150
Sangat mudah	50%	50*4 = 200
Total		=350/4 = 87,5 Nilai IKM setelah di konversi adalah 87,50 dengan mutu pelayanan kategori baik (B)

Sumber data : data diolah

Secara keseluruhan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) di dapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi sebesar 86,90 dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 42 Hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2024

No	Nomor responden	Nilai Unsur Pelayanan							Rata-rata
		u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	
1	CV. Pratama karya Konsult	4	4	4	4	4	4	4	
2	PT. Adipa Karya Andalas	4	4	4	4	4	4	4	
3	PT. Pertlite Andalas Lestari	3	3	3	3	3	3	3	

No	Nomor responden	Nilai Unsur Pelayanan							Rata-rata
		u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	
4	PT. Minang Semesta Alam	3	4	3	3	3	3	3	
5	PT. Putra Nusantara Gemilang	3	3	3	3	3	3	3	
6	CV. Tekad Jaya	4	3	3	4	4	4	4	
Total nilai per unsur		21	21	20	21	21	21	21	
IKM per unsur		3.50	3.50	3.33	3.50	3.50	3.50	3.50	3.48
Skor KM Total		**86.90**							

Sumber data : data diolah

Dengan nilai IKM yang didapat sebesar 86.90 maka mutu pelayanan masuk kedalam kategori Baik (B).

Untuk Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 43 Perbandingan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	79 %	79,58 %	100,73 %
2023	80 %	81,1 %	101,38 %
2024	81 %	86,90 %	107,28 %

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2021 belum terdapat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait pelayanan organisasi, kemudian untuk tahun 2022 – 2024 capaian kinerja mengalami kenaikan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (tahun akhir renstra 2026 sebesar 83 %) sudah mencapai target, dan akan dilakukan penyesuaian pada target tahun selanjutnya.

Untuk perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional, berdasarkan capaian kinerja Kementerian Perhubungan yang terdapat pada situs http://eperformance.dephub.go.id, dapat dilihat indikator kinerja Kementerian Perhubungan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan transportasi dengan target tahun 2024 adalah 88,5 dengan realisasi 95,62 dan capaian 108,05 %. (Kondisi Oktober 2024). Hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Kementerian Perhubungan per 31 Oktober 2024 melalui https://skm.dephub.go.id dengan jumlah responden sebanyak 10.834 dengan 352 Lokus, telah didapat nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 95,62 termasuk dalam kategori mutu layanan A dengan nilai kinerja unit pelayanan adalah Sangat Baik.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan memiliki cara penghitungan sendiri terkait indikator indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkat pelayanan sektor perhubungan.

Dalam pencapaian target, berikut ini faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian indikator kinerja

Tabel III. 44 Faktor pendorong / penghambat indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
1. Kualitas sarpras yang ada di terminal Tipe B 2. Adanya Koordinasi yang baik secara internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan masyrakat, sehingga pelaksanaan penilaian tingkat kepuasan pelayanan organisasi dapat terlaksana dengan baik 3. Dukungan teknologi sehingga pengambilan	1. Keterbatasan dalam sumber daya organisasi, baik itu dalam hal personel, anggaran, atau infrastruktur, juga dapat membatasi kemampuan organisasi untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan 2. Kurangnya minat atau tingkat ketertarikan masyarakat untuk mengisi kuesioner 3. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk pengembangan	1. Sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kepuasan pelayanan organisasi serta efektivitas langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. 2. Melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait barcode survey IKM ini, dan menyebarkan secara aktif di media sosial yang ada 3. Bersurat kepada TAPD	1. Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk rahabilitasi terminal 2. Untuk upaya perbaikan perlu berfokus pada peningkatan kualitas layanan dengan memperbaiki proses, melatih staf, dan menerapkan praktik terbaik dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa di Terminal Tipe B

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Solusi yang telah dilakukan	Upaya Perbaikan Kedepannya
hasil dapat dilakukan dengan menarik data dari barcode pengisian.	sarana prasarana terminal	untuk mengalokasikan secara terpisah untuk pengembangan sarpras terminal, mengingat terminal merupakan sumber PAD Pemerintah Provinsi	

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 4 sub kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 45 Anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.143.000	76.900.200	98,41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.855.250	101.867.216	94,45%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.569.999	51.520.036	98,00%
Total	238.568.249	230.287.452	96,53%

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(Pagu\ Anggaran\ X\ Capaian\ Kinerja) - Realisasi\ Anggaran}{(Pagu\ Anggaran)} \text{ x } 100\ \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efesiensi, tingkat efesiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

Nilai Efesiensi = 50%+((tingkat efesiensi)/20 x 50)

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Tabel III. 46 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efesiensi Kinerja	Nilai Efesiensi (Konversi Nilai efesiensi skala 0-100%)
				(((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	NE= 50% + (Efesiensi Kinerja/20 * 50
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	238.568.249	230.287.452	101,67%	0,05	62,85%

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penggunaan anggaran yang ada mampu digunakan secara optimal untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan jasa transportasi, kemudian dikarenakan tingkat efisiensi lebih dari 20%, maka nilai efisiensi adalah 100%.

3.4 Realisasi Anggaran

Tabel III. 47 Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Belanja	Anggaran total	Realisasi (RP)	Persentase Per Anggaran Total
1	Belanja gaji dan tunjangan	10.189.358.513	9.496.171.322	93,2%
2	Belanja Penunjang Urusan	4.311.478.125	4.200.552.516	97,43%
3	Belanja Urusan	3.990.297.540	3.924.235.256	98,34%
	TOTAL	18.491.134.178	17.620.959.094	**95,29%**

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 48 Realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan Program

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran TA 2024	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 14,538,948,638	Rp 13,730,516,794	94.44%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 3,159,657,371	Rp 3,102,688,519	98.2%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 724,728,969	Rp 721,626,031	99.57%
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 67,799,200	Rp 66,127,750	97.53%
	TOTAL	18.491.134.178	17.620.959.094	**95,29%**

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 49 Realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2024:

Sumber data : Hasil Analisa dan Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Sisa Anggaran
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.538.948.638**	**13.730.516.794**	**94,44**	808.431.844
1,1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**238.568.249**	**230.287.452**	**96,53**	8.280.797
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.143.000	76.900.200	98,41	1.242.800
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.855.250	101.867.216	94,45	5.988.034
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.569.999	51.520.036	98	1.049.963
1,2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.407.848.264**	**9.709.054.573**	**93,29**	698.793.691
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.189.358.513	9.496.171.322	93,2	693.187.191
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.304.500	165.477.000	98,91	1.827.500
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	51.185.251	47.406.251	92,62	3.779.000
1,3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.986.406**	**93.704.104**	**92,79**	7.282.302
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	69.840.406	64.371.278	92,17	5.469.128
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	31.146.000	29.332.826	94,18	1.813.174
1,4	**Administrasi Pendapatan Daerah**	**38.112.000**	**33.792.956**	**88,67**	4.319.044

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Sisa Anggaran
	Kewenangan Perangkat Daerah				
1.4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	31.873.000	27.714.557	86,95	4.158.443
1.4.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	6.239.000	6.078.399	97,43	160.601
1,5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**102.643.250**	**97.037.762**	**94,54**	5.605.488
1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102.643.250	97.037.762	94,54	5.605.488
1,6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**958.927.259**	**957.512.895**	**99,85**	1.414.364
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.550.000	35.517.000	99,91	33.000
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.838.700	29.933.270	97,06	905.430
1.6.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.210.200	223.972.500	99,89	237.700
1.6.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.954.000	24.954.000	100	0
1.6.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.150.000	15.001.000	99,02	149.000
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.224.359	628.135.125	99,99	89.234

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Sisa Anggaran
1,7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.310.100**	**19.018.000**	**98,49**	292.100
1.7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.310.100	19.018.000	98,49	292.100
1,8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.415.131.259**	**2.345.752.253**	**97,13**	69.379.006
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	13.744.501	98,18	255.499
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.098.500	243.731.217	85,79	40.367.283
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.117.032.759	2.088.276.535	98,64	28.756.224
1,9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**257.421.851**	**244.356.799**	**94,92**	13.065.052
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.169.851	130.278.299	92,94	9.891.552
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.400.000	31.493.500	91,55	2.906.500
1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.852.000	82.585.000	99,68	267.000
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**3.159.657.371**	**3.102.688.519**	**98,2**	56.968.852
2,1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**171.459.000**	**170.723.396**	**99,57**	735.604
2.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	171.459.000	170.723.396	99,57	735.604
2,2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**183.091.071**	**157.704.679**	**86,13**	25.386.392

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Sisa Anggaran
2.2.1	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	43.004.000	39.532.790	91,93	3.471.210
2.2.2	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	82.693.871	66.324.174	80,2	16.369.697
2.2.3	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	11.943.000	11.887.716	99,54	55.284
2.2.4	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	17.320.300	15.541.699	89,73	1.778.601
2.2.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	1.690.000	1.690.000	100	0
2.2.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan	26.439.900	22.728.300	85,96	3.711.600

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Sisa Anggaran
	Penunjang) [UPTD - Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]				
2,3	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**2.574.756.300**	**2.547.310.701**	**98,93**	27.445.599
2.3.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	916.983.100	911.284.895	99,38	5.698.205
2.3.2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.657.773.200	1.636.025.806	98,69	21.747.394
2,4	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**70.741.800**	**70.363.038**	**99,46**	378.762
2.4.1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	70.741.800	70.363.038	99,46	378.762
2,5	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**109.609.200**	**109.463.829**	**99,87**	145.371
2.5.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	109.609.200	109.463.829	99,87	145.371
2,6	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**46.558.800**	**43.683.676**	**93,82**	2.875.124
2.6.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	46.558.800	43.683.676	93,82	2.875.124

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Sisa Anggaran
	dalam 1 (satu) Provinsi				
2,7	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.441.200**	**3.439.200**	**99,94**	2.000
2.7.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.441.200	3.439.200	99,94	2.000
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**724.728.969**	**721.626.031**	**99,57**	3.102.938
3,1	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**46.745.550**	**46.590.984**	**99,67**	154.566
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	46.745.550	46.590.984	99,67	154.566
3,2	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**655.593.719**	**652.682.247**	**99,56**	2.911.472

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)	Sisa Anggaran
3.2.1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	645.419.119	643.049.813	99,63	2.369.306
3.2.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.174.600	9.632.434	94,67	542.166
3,3	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**22.389.700**	**22.352.800**	**99,84**	36.900
3.3.1	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22.389.700	22.352.800	99,84	36.900
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**67.799.200**	**66.127.750**	**97,53**	1.671.450
4,1	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**67.799.200**	**66.127.750**	**97,53**	1.671.450
4.1.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	35.718.050	34.931.600	97,8	786.450
4.1.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	32.081.150	31.196.150	97,24	885.000
		18.491.134.178	17.620.959.094		870.175.084

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 5 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 %, penyebabnya antara lain sisa anggaran dari rincian belanja sub kegiatan yang tidak terealisasi serta efisiensi anggaran. Sementara sisa kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan kinerja Dinas Perhubungan, untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 105,51 %, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat disimpulkan di tingkat sasaran seluruh indikator kinerja sasaran telah tercapai.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Esselon II

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa R.Soeprapto No.1 No. 12 Telp/WA :08117538111

http://dishub.sumbarprov.go.id

PADANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Desember 2024

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM
NIP. 19721222 199403 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	6 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	20.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,42
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	81%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.349.590.125	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.159.657.371	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	724.728.969	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	67.799.200	APBD
JUMLAH		**8.301.775.665**	APBD

Padang, Desember 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEDY DIANTOLANI,S.Sos.,MM
NIP. 19721222 199403 1 002

Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Nama Penghargaan	:	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemenang dalam kategori Pemerintah Daerah dengan Data Dukung usulan trayek terbaik dalam perintis award 2023
Pemberi Penghargaan	:	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Capt. Hendri Ginting)
Penerima Penghargaan	:	Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Syamsuriani, SH, MM)
Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	:	Alana Hotel, Jogjakarta, 1 Agustus 2023

Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2023

Nama Penghargaan	:	Suksesnya pengaturan lalu lintas arus mudik dan arus balik lebaran idul fitri 1444 H / 2023 M di Provinsi Sumatera Barat
Pemberi Penghargaan	:	Gubernur Sumatera Barat
Penerima Penghargaan	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat